



LAPORAN HASIL PENELITIAN

Penelitian Terapan Dosen PTN/PTS Provinsi Kalimantan Timur

**PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MENGHADAPI
MASYARAKAT EKONOMI
ASEAN (MEA) 2015**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2015**

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Pemberdayaan Aparatur Pemerintah kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur \ Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015
2. Bidang Penelitian : Pemerintahan dan Aparatur
3. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Thomas Robert Hutaaruk, S.P., M.Si.
 - b. NIP : 1117127103
 - c. Golongan Pangkat : Penata/IIIc
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Jabatan Struktural : -
 - f. Fakultas/Jurusan : Manajemen
 - g. Pusat/Lembaga Penelitian : UP3M STIMI
 - h. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia
 - i. Alamat Perguruan Tinggi : Jl. M. Yamin RT. VII No. 78 Samarinda
 - j. Alamat e-mail* : thomas_huta @yahoo.com
 - k. Telepon/ Nomor HP : 085248733774
4. Jumlah Anggota Peneliti : 2 (dua) orang
Nama Lengkap dan Gelar Anggota I : Salasiah, S.Sos., M.Si.
Nama Lengkap dan Gelar Anggota II : Jamly Hutahean, S.Sos., M.Si.
5. Lokasi Penelitian : Samarinda, Balikpapan, Bontang, Tanjung Redeb
6. Jangka Waktu Penelitian : 3 (tiga) .bulan
7. Dana yang Diusulkan : Rp. 42.000.000,-

Samarinda, Maret 2015

Mengetahui,
Ketua STIMI,

Ketua Peneliti,

Drs. Moh. Romadloni, M.M.
NIK. 11.101.1.134.96

Thomas R. Hutaaruk, S.P., M.Si.
NIDN. 1117127103

Menyetujui:

Prof. Dr., H. Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd.
Pembina Utama
NIP. 19600216 198511 1 001

TIM PENELITI

**Thomas Robert Hutauruk, S.P., M.Si.
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia**

**Salasiah, S.Sos., M.Si.
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda**

**Jamli, S.Sos., M.Si.
Politeknik Negeri Samarinda**

KATA PENGANTAR

Salah satu tantangan yang dihadapi Pemerintah Indonesia saat ini adalah komitmen untuk melaksanakan apa yang telah disepakati bersama dengan negara-negara ASEAN dalam perjanjian AFTA. Dalam hal ini ekonomi Indonesia akan dihadapkan berbagai kepentingan para pelaku usaha yang tergabung di dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA akan mempengaruhi berbagai aktifitas masyarakat yang ada di dalam negeri. Untuk itu dibutuhkan kemampuan aparaturnya pemerintah dalam memberikan pelayanan mulai dari tingkat Pusat hingga ke daerah-daerah.

Melalui penelitian yang berjudul **Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015** telah memberikan gambaran aktual sejauh mana kesiapan aparaturnya pemerintah di daerah dalam menghadapi MEA, dan apa upaya yang perlu dipersiapkan dalam mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Tim Peneliti yang telah bersedia mengalokasikan waktunya untuk melakukan kajian bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam perumusan kebijakan menjelang masuknya MEA 2015. Penelitian ini merupakan salah satu bentuk sinergis antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Perguruan Tinggi (PTN/PTS) dalam mendukung program-program pembangunan di daerah. Semoga kegiatan ini akan terus berlanjut untuk kemajuan IPTEK di bumi Rukai

Rahayu yang kita cintai ini. Mari membangun Kaltim untuk kesejahteraan masyarakat.

Samarinda, Oktober 2015

Kepala Balitbangda Prov. Kalimantan Timur

Prof. Dr., H. Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd.
Pembina Utama
NIP. 19600216 198511 1 001

DAFTAR ISI

TIM PENELITI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAKSI.....	x
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1.. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Kegunaan Penelitian	5
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teoritis	6
2.1.1. Sekilas ASEAN Free Trade Area (AFTA)	6
2.1.2. Pelaksanaan Realisasi AFTA	8
2.1.3. Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Manfaatnya Bagi Indonesia.....	9
2.1.4. Kemampuan Daya Saing Indonesia.....	12
2.1.5. Pelayanan Publik	15
2.1.6. Pemberdayaan Aparatur Negara.....	26
2.2. Penelitian Terdahulu (<i>Road Map</i>)	37

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian	40
3.2. Teknik Sampling	40
3.3. Metode Pengumpulan Data	41
3.4. Analisis Data	41

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Data Penelitian	44
4.1.1. Gambaran Umum Wilayah Studi	44
4.1.1.1. Keadaan Geografis	44
4.1.1.2. Demografi	49
4.1.1.3. Infrastruktur	63
4.1.1.4. Sumberdaya Alam	71
4.1.2. Potret Investasi Daerah	85
4.1.3. Sumberdaya Aparatur	98
4.1.4. Perizinana	102
4.2. Pembahasan	105
4.2.1. Kemampuan Aparatur Pemerintah Dalam Memberikan Pelayanan Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Tuntutan AFTA 2015	105
4.2.2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam Memasuki AFTA 2015	113

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	118
5.2. Saran-saran.....	119

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Peringkat Daya Saing Indonesia di ASEAN	13
2.2. Peringkat Kemudahan Berbisnis di ASEAN.....	14
2.3. Peringkat Daya Saing Negara Anggota ASEAN dan Negara Mitra ASEAN.....	25
2.6. Peringkat Kemudahan Berbisnis di ASEAN.....	26
3.1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.....	41
4.1. Luas Masing-Masing Formasi Geologi Kota Samarinda.....	48
4.2. Gambaran Umum Wilayah Studi	54
4.3. Pertumbuhan IKM Di Kota Samarinda Tahun 2012-2014	87
4.4. Perkembangan Koperasi Aktif Di Kota Samarinda (Unit) Tahun 2012-2014.....	89
4.5. PMA dan PMDN Di Kota Samarinda Tahun 2004-2012	90
4.6. Realisasi Investasi di Kota Samarinda Tahun 2004 – 2014.....	91
4.7. Jumlah Perusahaan dan Tenaga kerja di Kabupaten Berau Per Juni 201	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Faktor-faktor Utama Penghambat Berbisnis di Indonesia	15
2.2. Bidang-bidang Kegiatan dan Intervensi negara (Weaver, 1984)	27
2.3. Road Map Penelitian Terdahulu	39\
3.1. Tahapan Analisis Data Model Spradley	43
4.1. Luas Fisiografi Kota Samarinda	46
4.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang dan kabupaten Berau Tahun 2006 - 2013	60
4.3. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja di Kota Samarinda Tahun 2010 - 2013	62
4.4. Penduduk Bekerja Menurut Sektor Pekerjaan Tahun 2011 dan 2012	62
4.5. Perkembangan Kondisi Jalan di Kota Samarinda	65
4.6. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin di Wilayah Studi	99
4.7. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan di Wilayah Studi	101
4.8. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang di Wilayah Studi	102

ABSTRAKSI

Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, 2015.

Penelitian bertujuan: 1) Mendeskripsikan dan menganalisis kemampuan aparatur pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan masyarakat yang berhubungan dengan tuntutan AFTA 2. 2) Menginventarisir faktor pendorong dan faktor penghambat bagi aparatur pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam memasuki AFTA 2015.

Penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu Juni – Agustus 2015. Lokasi penelitian terpilih adalah Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kabupaten Berau. Penelitian menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif model Spradley.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Aparatur pemerintah di daerah telah dipersiapkan untuk memberikan layanan terhadap publik melalui Program Pelatihan dan Pendidikan (Diklat), Fungsional, Bimbingan Teknis, hingga Studi Lanjut. Namun tidak dipersiapkan untuk memberikan layanan yang bersifat global atau lintas antara bangsa; 2) Sumberdaya Manusia yang dimiliki pemerintah daerah telah mencukupi untuk memberikan layanan publik, namun karena penempatan yang kurang tepat dan tidak proporsional (sesuai kebutuhan) kerap kali dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi kurang efektif; 3) Masuknya MEA merupakan peluang sekaligus ancaman bagi kelangsungan usaha di daerah. Peluang dalam memperluas lapangan usaha, kesempatan kerja bagi masyarakat, dan sumber pendapatan daerah. Namun juga merupakan ancaman bagi investor lokal yang kurang kompeten ataupun kurang memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam kerjasama AFTA; 4) Kebanyakan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah telah bekerja menurut aturan yang berlaku, namun belum sesuai dengan standar-standar yang berlaku, sehingga timbul stagnan antara data aktual dengan keputusan yang diambil; 5) Masih dibutuhkan aparatur pemerintah yang bersertifikat pengawas perdagangan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup besar untuk melakukan pengawasan peredaran barang dan jasa sebagai dampak dari masuknya MEA.

Kata-kata Kunci; AFTA, Aparatur Pemerintah, MEA, Pemberdayaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai bagian dari *ASEAN Economic Community* (AEC) 2015 harus siap menerima kedatangan para investor dari negara ASEAN lainnya yang secara bebas berusaha, sebagai dampak dari berlakunya bebas tarif. Tujuan daripada MEA 2015 adalah untuk menciptakan ASEAN sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, di mana free flow atas barang, jasa dan faktor produksi, investasi, modal dan penghapusan tarif bagi perdagangan antara negara ASEAN. Kedatangan mereka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan, yang berarti ada peningkatan kesejahteraan, namun sebaliknya justru pertumbuhan ekonomi akan merosot ketika pemerintah tidak mampu mengelolanya. Tantangan terbesar pemerintah Indonesia dalam menghadapi pasar AFTA 2015 kualitas sumber daya manusia yang masih belum mengungguli sumberdaya manusia lainnya di ASEAN, sumberdaya alam yang berpotensi cukup besar masih dikuasai oleh negara asing, tumpang tindih kebijakan yang membingungkan investor dalam negeri, upah buruh di bawah kebutuhan layak hidup, dan pelayanan publik masih belum memenuhi harapan masyarakat.

Naisbit (1995: 119) mengemukakan pendapat bahwa sekalipun terdapat ketidaksempurnaan pasar, dunia telah menerima sistem pasar bebas sebagai suatu cara untuk mengorganisasikan kehidupan ekonomi. Bagaimana pasar bebas akan

berkembang di negara-negara Asia bergantung pada kejelian pemerintahnya dan kekuatan kepemimpinan bisnisnya.

Beberapa hasil studi menunjukkan masih banyak kelemahan dalam pelaksanaan pelayanan publik di daerah. Keluhan terkait dengan buruknya pelayanan publik di berbagai sektor masih menjadi mendominasi persoalan yang dikemukakan masyarakat hingga tahun ke 13 pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Baik atau buruknya pelayanan publik tentu terkait dengan pelaksana pelayanan itu sendiri yaitu aparatur pemerintah. Tuntutan terhadap aparatur pemerintah bekerja secara profesional masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Budaya kerja yang masih belum memuaskan masyarakat merupakan cerminan ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan. Meskipun dalam melaksanakan pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya berpedoman pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maupun Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (telah diubah menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) menyangkut Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tuntutan bagi aparatur pemerintah memasuki AFTA 2015 adalah pegawai yang profesional dan akuntabel serta mampu mengimplementasikan kemampuannya dalam bentuk inovasi pelayanan publik yang terukur, mampu memberikan rasa aman, konsisten, taat aturan dan berdedikasi tinggi terhadap kepentingan umum, bangsa dan negara. Karena itu, pemerintah mulai dari tingkat Pusat hingga pemerintahan desa harus mengubah paradigma dalam mempersiapkan diri menghadapi MEA 2015 dengan cara meningkatkan

kompetensi. MEA 2015 melalui produk AFTA 2015 sendiri merupakan cara negara-negara ASEAN menghadapi pasar bebas dunia di tahun 2030. Di dalam Grand Design Reformasi Birokrasi (Perpres No. 81 Tahun 2010) disebutkan bahwa reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Selain itu, reformasi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah pertarungan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21. Karena itu, kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran strategis dalam melakukan perbaikan di semua lini terkait pelayanan publik. Di dalam Perpres No. 81 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Reformasi birokrasi berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (*overlapping*) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, reformasi birokrasi pun perlu menata ulang proses birokrasi dari tingkat (*level*) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya memperbaiki layanan kepada penduduk Indonesia saja, namun setiap orang atau badan usaha yang berurusan di wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia terkait AFTA 2015.

Melalui penelitian ini diharapkan akan ditemukan bentuk-bentuk layanan publik yang sudah dilakukan aparaturnya pemerintah di daerah, dan upaya-upaya

perbaikan yang perlu dilakukan dalam menumbuhkan daya inovatif menghadapi AFTA 2015 dan mendukung reformasi birokrasi.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan sehingga perlu dilakukan penelitian adalah:

1. Apakah aparatur pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan pelayanan sesuai dengan tuntutan AFTA 2015?
2. Apa yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat bagi aparatur pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam memasuki AFTA 2015?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis kemampuan aparatur pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan masyarakat yang berhubungan dengan tuntutan AFTA 2015.
- 2) Menginventarisir faktor pendorong dan faktor penghambat bagi aparatur pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam memasuki AFTA 2015.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan terkait pelaksanaan AFTA 2015. Keluaran dari penelitian ini berupa laporan yang menggambarkan kondisi aktual model pemberdayaan aparatur pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim memasuki AFTA 2015 ditinjau dari aspek pelayanan publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Sekilas ASEAN Free Trade Area (AFTA)

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. Awalnya AFTA ditargetkan ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008), kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan nontarif lainnya. Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunai

Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura dan Thailand, dan bagi Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam padatahun 2015.

Produk yang dikategorikan dalam General Exception adalah produk-produk yang secara permanen tidakperlu dimasukkan kedalam CEPT-AFTA, karena alasan keamanan nasional, keselamatan, atau kesehatanbagi manusia, binatang dan tumbuhan, serta untuk melestarikan obyek-obyek arkeologi dan budaya.Indonesia mengkatagorikan produk-produk dalam kelompok senjata dan amunisi, minuman beralkohol, dan sebagainya sebanyak 68 pos tarif sebagai General Exception.

Manfaat AFTA bagi Indonesia adalah: 1) Peluang pasar yang semakin besar dan luas bagi produk Indonesia, dengan penduduk sebesar ±500 juta dan tingkat pendapatan masyarakat yang beragam; 2) Biaya produksi yang semakin rendah dan pasti bagi pengusaha/produsen Indonesia yang sebelumnya membutuhkan barang modal dan bahan baku/penolong dari negara anggota ASEANlainnya dan termasuk biaya pemasaran; 3) Pilihan konsumen atas jenis/ragam produk yang tersedia di pasar domestik semakin banyakdengan tingkat harga dan mutu tertentu; 4) Kerjasama dalam menjalankan bisnis semakin terbuka dengan beraliansi dengan pelaku bisnis dinegara anggota ASEAN lainnya. AFTA merupakan tantangan bagi pengusaha/produsen Indonesia agar dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan bisnis secara profesional guna dapat memenangkan kompetisi dari produk yang berasal dari negara anggota ASEAN lainnya baik dalam memanfaatkan peluang pasar domestik maupun pasar negara anggota ASEAN lainnya.

2.1.2. Pelaksanaan Realisasi AFTA

KTT ASEAN ke-9 tanggal 7-8 Oktober 2003 di Bali, dimana enam negara anggota ASEAN Original Signatories of CEPT AFTA yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapur dan Thailand, sepakat untuk mencapai target bea masuk dengan tingkat tarif 0% minimal 60% dari Inclusion List (IL) tahun 2003; bea masuk dengan tingkat tarif 0% minimal 80% dari Inclusion List (IL) tahun 2007; dan pada tahun 2010 seluruh tarif bea masuk dengan tingkat tarif 0% harus sudah 100% untuk anggota ASEAN yang baru, tarif 0% tahun 2006 untuk Vietnam, tahun 2008 untuk Laos dan Myanmar dan tahun 2010 untuk Cambodja.

Tahun 2000: Menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 85% dari seluruh jumlah pos tarif dalam Inclusion List (IL).

Tahun 2001: Menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 90% dari seluruh jumlah pos tarif dalam Inclusion List (IL).

Tahun 2002: Menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 100% dari seluruh jumlah pos tarif dalam Inclusion List (IL), dengan fleksibilitas.

Tahun 2003: Menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 100% dari seluruh jumlah pos tarif dalam Inclusion List (IL), tanpa fleksibilitas.

Untuk ASEAN-4 (Vietnam, Laos, Myanmar dan Cambodja) realisasi AFTA dilakukan berbeda yaitu: Vietnam tahun 2006 (masuk ASEAN tanggal 28

Juli 1995). Laos dan Myanmar tahun 2008 (masuk ASEAN tanggal 23 Juli 1997). Cambodia tahun 2010 (masuk ASEAN tanggal 30 April 1999).

Era AFTA, peran negara dalam perdagangan sebenarnya akan direduksi secara signifikan. Sebab, mekanisme tarif yang merupakan wewenang negara dipangkas. Karena itu, diperlukan perubahan paradigma yang sangat signifikan, yakni dari kegiatan perdagangan yang mengandalkan proteksi negara menjadi kemampuan perusahaan untuk bersaing. Tidak saja secara nasional atau regional dalam AFTA, namun juga secara global. Karena itu, kekuatan manajemen, efisiensi, kemampuan permodalan dan keunggulan produk menjadi salah satu kunci keberhasilan.

Regulasi dan Kebijakan Persaingan Sehat merupakan 2 (dua) instrumen penting yang dimiliki negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mengingat kebijakan Persaingan Usaha merupakan bagian dari Regulasi ekonomi. Tetapi pada tataran implementasi kedua instrumen ini dilakukan oleh institusi yang berbeda. Regulasi terutama biasanya, walau tidak terbatas, mengatur sektor publik karena alokasi sumberdaya di sektor ini lebih banyak dipengaruhi keputusan politik dan pemerintah, bukan diatur oleh hukum pasar semata. Sementara hukum persaingan lebih fokus pada sektor oligopoli yang cenderung membentuk kekuatan pasar untuk memperoleh keuntungan monopoli (Pasaribu, 2010).

2.1.3. Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Manfaatnya Bagi Indonesia

Sejalan dengan pesatnya dinamika hubungan antar-bangsa di berbagai kawasan, ASEAN menyadari pentingnya integrasi negara-negara di Asia

Tenggara. Pada pertemuan informal para Kepala Negara ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 15 Desember 1997 disepakati ASEAN *Vision 2020* yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di Hanoi yang menghasilkan *Hanoi Plan of Action* (HPA). Visi 2020 termasuk HPA berisi antara lain: kondisi yang ingin diwujudkan di beberapa bidang, seperti orientasi ke luar, hidup berdampingan secara damai dan menciptakan perdamaian internasional.

Beberapa agenda kegiatan yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan Visi 2020 adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan hidup, sosial, teknologi, hak cipta intelektual, keamanan dan perdamaian, serta turisme melalui serangkaian aksi bersama dalam bentuk hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan di antara negaranegara anggota ASEAN.

Di dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-9 pada 2003 di Bali dicetuskanlah ASEAN *Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Para pemimpin ASEAN menyepakati Bali Concord II yang memuat 3 (tiga) pilar untuk mencapai visi ASEAN 2020, yaitu ekonomi, sosial-budaya, dan politik-keamanan. Dalam soal ekonomi, upaya pencapaian visi ASEAN diwujudkan dalam bentuk MEA.

Pada 2007 pemimpin ASEAN menyepakati percepatan waktu implementasi MEA dari 2020 menjadi 2015. Untuk mewujudkannya, dirumuskan cetak biru (blueprint) MEA yang dibagi dalam empat tahap, dari 2008 hingga 31 Desember 2015. Berlakunya MEA 2015, berarti negara-negara ASEAN menyepakati perwujudan integrasi ekonomi kawasan yang penerapannya mengacu

pada *ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint*. MEA merupakan komitmen untuk menjadikan ASEAN, antara lain, sebagai pasar tunggal dan basis produksi serta kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata.

Menurut data Sekretariat ASEAN yang dilansir oleh Kementerian Perdagangan, dalam pertemuan *Senior Economic Officials Meetings* ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar, Ahad, 24 Agustus 2014, disebutkan bahwa MEA telah memberi banyak manfaat bagi negara-negara anggotanya. Bagi Indonesia MEA membero manfaat dalam:

- 1) Kemiskinan turun dari 45 persen pada 1990 menjadi 15,6 persen pada 2010.
- 2) Kelas menengah naik dari 15 persen (1990) menjadi 37 persen (2010).
- 3) Investasi tumbuh dari US\$ 98 miliar (2010) menjadi US\$ 110 miliar (2012). Khusus Indonesia, investasi tumbuh dari US\$ 13,8 miliar (2010) menjadi US\$ 19,9 miliar (2012).
- 4) Produk Domestik Bruto (PDB) 2011 berkembang 5,7 persen dengan nilai US\$ 2,31 triliun. PDB per kapita berkembang dari US\$ 965 (1998) menjadi US\$ 3.601 (2011).
- 5) Perdagangan barang 2012 mencapai US\$ 2,48 triliun. Khusus Indonesia, perdagangan di kawasan ASEAN sebesar US\$ 381,7 miliar (2012).

Menurut Direktur Eksekutif *Center of Reform on Economics* (CORE) Hendri Saporini, kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 baru mencapai 82 persen. Hal itu ditengarai dari 4 (empat) isu penting yang perlu segera diantisipasi pemerintah dalam menghadapi MEA 2015, yaitu: 1) Indonesia

berpotensi sekedar pemasok energi dan bahan baku bagi industrilisasi di kawasan ASEAN, sehingga manfaat yang diperoleh dari kekayaan sumberdaya alam minimal, tetapi defisit neraca perdagangan barang Indonesia yang saat ini paling besar di antara negara-negara ASEAN semakin bertambah, 2) melebarkan defisit perdagangan barang jasa seiring peningkatan perdagangan barang, 3) membebaskan aliran tenaga kerja sehingga Indonesia harus mengantisipasi dengan menyiapkan strategi karena potensi membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA), dan 4) masuknya investasi ke Indonesia dari dalam dan luar ASEAN.

2.1.4. Kemampuan Daya Saing Indonesia

Tantangan internal utama Indonesia dalam menyongsong MEA 2015 adalah masih lemahnya daya saing nasional. Berdasarkan data World Economic Index, daya saing Indonesia antara tahun 2009 – 2010 menduduki peringkat ke-54 dari 152 negara. Pada periode 2010 – 2011 peringkat Indonesia meningkat menjadi peringkat ke-44. Namun pada periode 2011 – 2012 peringkat Indonesia turun menjadi peringkat ke-46, periode 2012 – 2013 turun menjadi peringkat ke-50, dan periode 2013-2014 naik menjadi peringkat ke-38 (Tabel 2.1).

Tabel 2.1. Peringkat Daya Saing Indonesia di ASEAN

Negara	Peringkat				
	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
Singapore	3	3	2	2	2
Japan	8	6	9	10	9
New Zealand	20	23	25	23	18
Australia	20	20	20	20	21
Malaysia	24	26	21	25	24
Korea Rep.	19	27	24	19	25
Brunei Darusalam	32	28	28	28	26
China	29	27	26	29	29
Thailand	36	38	39	38	37
Indonesia	54	44	46	50	38
Philippines	87	83	75	65	59
India	49	51	56	59	60
Vietnam	75	59	65	75	70
Lao PDR	n/a	n/a	n/a	n/a	81
Cambodia	110	109	97	85	88
Myanmar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: World Economic Index

Rendahnya daya saing nasional disebabkan oleh ekonomi biaya tinggi yang masih terjadi di Indonesia, khususnya terkait masalah infrastruktur, kelembagaan dan logistik. Selain itu, rendahnya daya saing Indonesia dapat dilihat dari mayoritas ekspor Indonesia ke ASEAN yang masih didominasi oleh produk-produk berbahan baku alam, seperti: batubara, gas alam, minyak nabati, dan minyak bumi yang nilainya mencapai 40% dari total ekspor Indonesia.

Masalah kelembagaan, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, lemahnya penegakan hukum, iklim usaha yang belum stabil (rendahnya pasokan energi, serta lemahnya akses finansial untuk usaha), belum harmonisnya kebijakan-kebijakan daerah dengan pusat, dan rendahnya jaminan keamanan melakukan usaha di Indonesia.

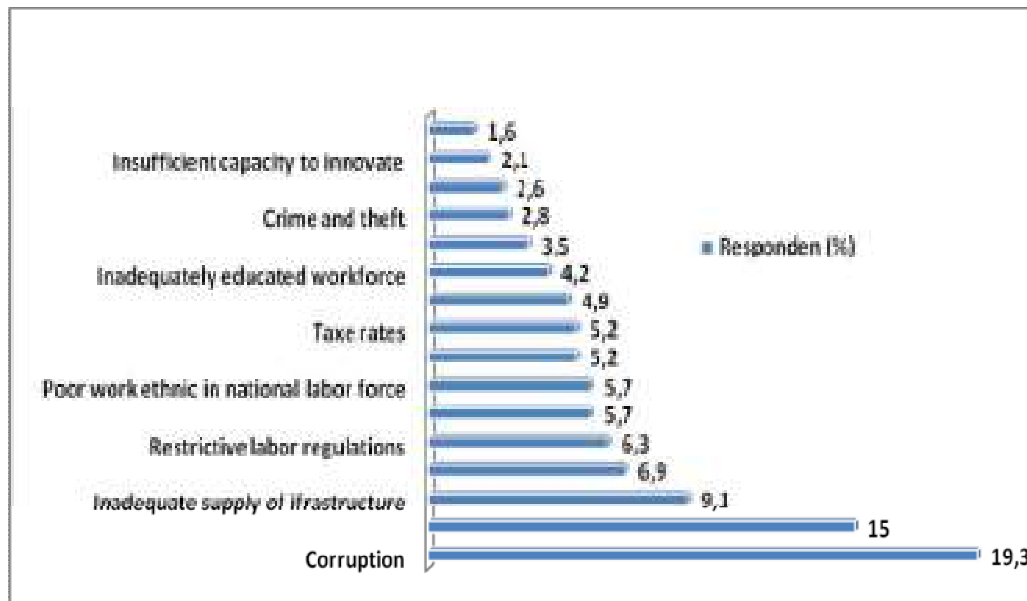
Rendahnya daya saing nasional juga disebabkan oleh masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Berdasarkan World Economic Forum, Indeks Sumberdaya Manusia Indonesia menduduki peringkat ke-53 dari 122 negara di dunia.

Berdasarkan data dari *International Finance Corporation* dan *The World Bank* tahun 2013, kemudahan berusaha di Indonesia masih sangat rendah. Kemudahan melakukan usaha di Indonesia berada di peringkat ke-2 di kawasan ASEAN.

Tabel 2.2. Peringkat Kemudahan Berbisnis di ASEAN

Negara	Ease of Doing Business Rank	Starting a Business	Dealing with Construction Permits	Getting Electricity	Registering Property	Getting Credit	Protecting Investors	Paying Taxes	Trading Across Borders	Enforcing Contract	Resolving Insolvency
Singapore	1	3	3	6	28	3	2	5	1	12	4
Malaysia	6	16	43	21	35	1	4	36	5	30	42
Thailand	18	91	14	12	29	73	12	70	24	22	58
Brunei Darusalam	59	137	46	29	116	55	115	20	39	161	48
Vietnam	99	109	29	156	51	42	157	149	66	46	149
Philippines	108	170	99	33	121	86	128	131	42	114	100
Indonesia	120	175	88	121	101	86	52	137	54	147	144
Cambodia	137	184	161	134	118	42	80	65	114	162	163
Lao PDR	159	85	96	140	76	159	187	119	161	101	189
Myanmar	182	189	150	126	154	170	182	107	113	188	155

Sumber: The World Bank



Gambar 2.1. Faktor-faktor Utama Penghambat Berbisnis di Indonesia

2.1.5. Pelayanan Publik

Menurut Moekijat (2000) pelayanan merupakan suatu kegiatan aktivitas yang sifatnya berwujud atau tidak berwujud yang dilakukan untuk melayani konsumen dengan memberikan barang atau jasa disertai atau tanpa disertai pemindahan kepemilikan atas suatu benda atau jasa tertentu.

Trilestari (2007) mendefinisikan pelayanan adalah adalah aktivitas/manfaat yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen (yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki.

Sugiarto (2002) mengatakan bahwa pelayanan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang tingkat kepuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani maupun dilayani.

Istilah pelayanan publik (public service) selalu terkait dengan kajian public administration. Public administration berhubungan dengan seberapa besar pengaruh/kaitan lembaga tersebut dengan kepentingan publik. Pelayanan publik

merupakan pendekatan seutuhnya seorang pegawai instansi kepada masyarakat dan menyebabkan masyarakat datang kembali untuk memohon pelayanan berikutnya.

Definisi Pelayanan publik menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah diarahkan kepada "pengguna jasa layanan" yang dilakukan oleh seorang pelayan publik, dalam hal ini adalah pegawai pemerintah. Para pengguna jasa pelayanan publik yang paling kokrit tentu saja adalah mereka yang secara langsung menerima atau menikmati jasa pelayanan publik itu.

Sekalipun demikian, secara konseptual pihak yang disebut pengguna jasa pelayanan publik itu sesungguhnya tidak hanya mereka yang langsung menikmatinya. Para calon pengguna dan para pengguna jasa pelayanan publik dimasa datang termasuk kategori ini.

Pemahaman di atas tentunya memberikan arahan tersendiri terhadap kualifikasi pemberian pelayanan. Disinilah perbedaan makna antara publik dan non publik. Perbedaan antara administrasi publik dan non-publik (privat) dari wacana pelayanan, yaitu : (1) pelayanan yang diberikan oleh administrasi publik lebih bersifat urgen atau mendesak dari pada yang dilaksanakan privat ; (2) pelayanan yang ditangani oleh administrasi publik pada umumnya bersifat

monopoli atau semi monopoli atau semi monopoli ; (3) kegiatan administrasi publik terikat oleh hubungan hukum formal ; (4) perbuatan administrasi public berada dibawah pengamtan masyarakat; (e) pelayanan yang diberikan oleh administrasi publik tidak terikat harga pasar.

Manajemen pelayanan publik di era otonomi daerah semakin mempermudah ruang gerak masing-masing daerah untuk melakukan upaya perbaikan layanan. Pengalaman beberapa daerah yang berhasil memanfaatkan dan mengembangkan sistem pelayanan publik terpadu diakui telah membawa dampak yang cukup signifikan baik terhadap perbaikan kualitas manajemen layanan publik pemerintah daerah, maupun peningkatan pendapatan daerah dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, pemerintah pusat tetap memiliki kendali atas keberlangsungan pemerintahan daerah tersebut secara terintegrasi yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam perencanaan peningkatan kualitas layanan publik nasional.

Dengan demikian dapat dikatakan yang dimaksud dengan manajemen pelayanan publik adalah proses pengelolaan meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dalam kegiatan tahapan pekerjaan pelayanan sesuai dengan sumber daya yang tersedia serta pedoman pelaksanaan dalam pelayanan serta kewenangan yang dimiliki yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. untuk mencapai tujuan, yaitu kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Menuju masyarakat yang sejahtera adil dan makmur.

Manajemen pelayanan publik dalam pelaksanaannya harus memperhatikan dan mengimplementasikan beberapa prinsip atau pedoman dalam pelayanan publik. Setiap pelayanan harus bisa memahami, beberapa prinsip pokok dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yakni :

- 1) Prinsip Aksesibilitas, yakni pada hakekatnya setiap pelayanan harus dapat dijangkau oleh setiap pengguna layanan. Tempat, jarak, dan system pelayanan sapat mungkin dekat dan mudah dijangkau/diakses oleh penggunaan pelayanan.
- 2) Prinsip Kontinuitas, yakni bahwa setiap jenis pelayanan harus secara terus menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut.
- 3) Prinsip Teknikalitas, yakni bahwa setiap jenis pelayanan proses pelayanannya harus ditangani oleh tenaga yang benar memahami secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketetapan dan kemantapan system, prosedur dan instrument pelayanan.
- 4) Prinsip Profitabilitas, bahwa proses pelayanan pada akhirnya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan keuntungan ekonomis dan social bagi pemerintah maupun bagi masyarakat secara luas.
- 5) Prinsip Akutabilitas, yakni bahwa proses, produk dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat karena aparat pemerintah itu pada hakekatnya mempunyai tugas meberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Menurut Kotler (2005) menjelaskan bahwa jasa (service) adalah aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun.

Menurut Tjiptono (2001) ada tiga karakteristik utama pelayanan jasa yaitu:

- 1) *Intangibility*, berarti bahwa pelayanan pada dasarnya bersifat *performance* dan hasil pengalaman dan bukannya suatu obyek. Kebanyakan pelayanan tidak dapat dihitung, diukur, diraba atau ditest sebelum disampaikan untuk menjamin kualitas. Jadi berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh suatu pabrik yang dapat ditest kualitasnya sebelum disampaikan kepada pelanggan.
- 2) *Heterogenity*, berarti pemakai jasa atau klien atau pelanggan memiliki kebutuhan yang sangat heterogen. Pelanggan dengan pelayanan yang sama mungkin memiliki prioritas yang berbeda. Demikian pula *performance* sering bervariasi dari satu produser ke produser lainnya bahkan dari waktu ke waktu.
- 3) *Inseparability*, berarti produksi dan konsumsi suatu pelayanan tidak terpisahkan. Konsekuensinya di dalam industri pelayanan kualitas tidak direkayasa ke dalam produksi di sektor pabrik dan kemudian disampaikan kepada pelanggan; tetapi kualitas terjadi selama penyampaian pelayanan, biasanya selama interaksi antara klien dan penyedia jasa.

Kotler (2005) mengidentifikasi sepuluh faktor kualitas pelayanan antara lain:

- 1) *Tangibles*, yaitu bukti fisik dari jasa misalnya perlengkapan pegawai, sarana komunikasi, dan peralatan yang digunakan;
- 2) *Reliability*, yaitu kehandalan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan, dan memuaskan. Perusahaan berarti memberikan jasanya secara tepat semenjak saat pertama (*right the first time*) :
- 3) *Responsiveness*, yaitu kemampuan kesiapan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap;
- 4) *Communication*. yaitu memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang dapat mereka pahami, serta selalu mendengar saran: dan keluhan-keluhan pelanggan;
- 5) *Credibility*, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya, misalnya mencakup nama baik perusahaan, reputasi, karakteristik pribadi *contact personal*, dan interaksi dengan para pelanggan;
- 6) *Security*, yaitu memberikan perlindungan dari rasa bahaya, resiko, dan keragu-raguan. Perlindungan ini mencakup keamanan baik secara fisik (*physical safety*), keamanan finansial (*financial security*) , maupun keamanan kerahasiaan pribadi (*confidentiality*);
- 7) *Competence*, yaitu kemampuan yang dimiliki setiap orang. dalam perusahaan atau organisasi meliputi keterampilan, intelektual, dan pengetahuan Yang sangat berguna untuk perusahaannya;

- 8) *Courtesy*, yaitu meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan yang dimiliki oleh para *contact personal* (misalnya resepsionis, operator, dan lain-lain);
- 9) *Understanding/Knowing Customers*, yaitu suatu usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan;
- 10) *Access*, yaitu meliputi kemudahan-kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal ini berarti lokasi fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menunggu yang tidak terlalu lama, saluran komunikasi perusahaan mudah dihubungi, dan lain-lain.

Beberapa prinsip yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan standar pelayanan sebagaimana diatur di dalam PermenPAN dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, meliputi:

- 1) Sederhana. Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
- 2) Partisipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
- 3) Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
- 4) Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikn sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.

- 5) **Transparansi.** Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
- 6) **Keadilan.** Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

Prinsip-prinsip di atas perlu mendapat perhatian serius bagi setiap aparat pelayanan (birokrasi), karena dipundak aparaturnya itulah kualitas pelayanan akan ditentukan. Masyarakat sebagai pengguna pelayanan akan menilai sejauh manakah birokrasi garis depan tersebut dapat mewujudkan semua prinsip pelayanan di atas, dan dari tindakan aparaturnya itulah prinsip akuntabilitas akan terjawab.

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani. (2006) kecenderungan global menunjukkan bahwa pemberian pelayanan publik yang kompetitif dan berkualitas kepada rakyatnya menjadi bagian dari komitmen pemerintah yang harus diwujudkan. Lebih lanjut dikatakan bahwa kecenderungan global diharapkan pemberian pelayanan yang semakin baik pada sebagian besar rakyat merupakan salah satu tolak ukur bagi kredibilitas dan sekaligus kepastian politik pemerintah dimanapun. Aspek pelayanan kepada masyarakat inilah yang menjadi salah satu tugas dan fungsi administrasi negara.

Bila dilihat dari jenis pelayanannya, dalam Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan disebutkan bahwa: pelayanan publik dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- 1) Kelompok pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misal: status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang, dan sebagainya. Contoh: KTP, Akte Kelahiran, Akte Kematian, SIM, STNK, BPKB, IMB, Paspor, dan sebagainya.
- 2) Kelompok Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya: jaringan telepon, tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.
- 3) Kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan jasa transportasi, pos, dan sebagainya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu pelayanan akan dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan apabila didukung oleh beberapa faktor:

- 1) kesadaran para pejabat pimpinan dan pelaksana adanya aturan yang memadai;
- 2) organisasi dengan mekanisme sistem yang dinamis
- 3) pendapatan pegawai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- 4) kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugas/pekerjaan yang dipertanggungjawabkan;\
- 5) tersedianya sarana pelayanan sesuai dengan jenis dan bentuk tugas/pekerjaan pelayanan.

Thamrin (2013) mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh intitusi pemerintah pusat dan atau daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tantangan internal utama Indonesia dalam menyongsong terwujudnya MEA 2015 adalah masih lemahnya daya saing nasional. Berdasarkan *data World Economic Index*, daya saing Indonesia sebenarnya telah selalu mengaolami perbaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 – 2010 Indonesia menduduki peringkat ke 54 dari 152 negara. Pada periode 2010 – 2011 peringkat Indonesia naik menjadi peringkat ke 44. Namun, di dua periode berikutnya Indonesia mengalami penurunan peringkat, yaitu berada di peringkat 46 pada periode 2011-2012 dan peringkat 50 pada periode 2012-2013. Pada periode 2013-2014, posisi Indonesia berada di peringkat 38. Di ASEAN, peringkat Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Tahiland (Tabel 2.2).

Rendahnya daya saing nasional disebabkan oleh ekonomi biaya tinggi yang masih terjadi di Indonesia khususnya terkait masalah infrastruktur, kelembagaan dan logistik. Dalam hal infrastruktur, anggaran belanja Indonesia hanya sebesar 29 persen dari total Anggaran Pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini dirasa masih sangat rendah mengingat besarnya wilayah Indonesia. Masalah-masalah kelembagaan yang menyebabkan rendahnya daya saing, seperti penyimpangan penggunaan keuangan, penyalahgunaan weqwenang, lemahnya penegakan hukum, iklim usaha yang belum stabil (rendahnya pasokan

energi, lemahnya akses finansial untuk usaha), belum harmonisnya kebijakan-kebijakan daerah dengan pusat, dan rendahnya jaminan keamanan melakukan usaha di Indonesia.

Tabel. 2.2. Peringkat Daya Saing Negara Anggota ASEAN dan Negara Mitra ASEAN

Negara	Peringkat				
	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
Singapore	3	3	2	2	2
Japan	8	6	9	10	9
New Zealand	20	23	25	23	18
Australia	20	20	20	20	21
Malaysia	24	26	21	25	24
Korea Rep.	19	27	24	19	25
Brunei Darusalam	32	28	28	28	26
China	29	27	26	29	29
Thailand	36	38	39	38	37
Indonesia	54	44	46	50	38
Philippines	87	83	75	65	59
India	49	51	56	59	60
Vietnam	75	59	65	75	70
Lao PDR	n/a	n/a	n/a	n/a	81
Cambodia	110	109	97	85	88
Myanmar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Global Competitiveness Index 2009 - 2014

Berdasarkan data *International Finance Corporation* dan *The World Bank* tahun 2013, kemudahan berusaha di Indonesia masih sangat rendah. Untuk kemudahan melakukan usaha, Indonesia berada di peringkat 7 di kawasan ASEAN. Posisi kemudahan berbisnis dan kriteria penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Peringkat Kemudahan Berbisnis di ASEAN

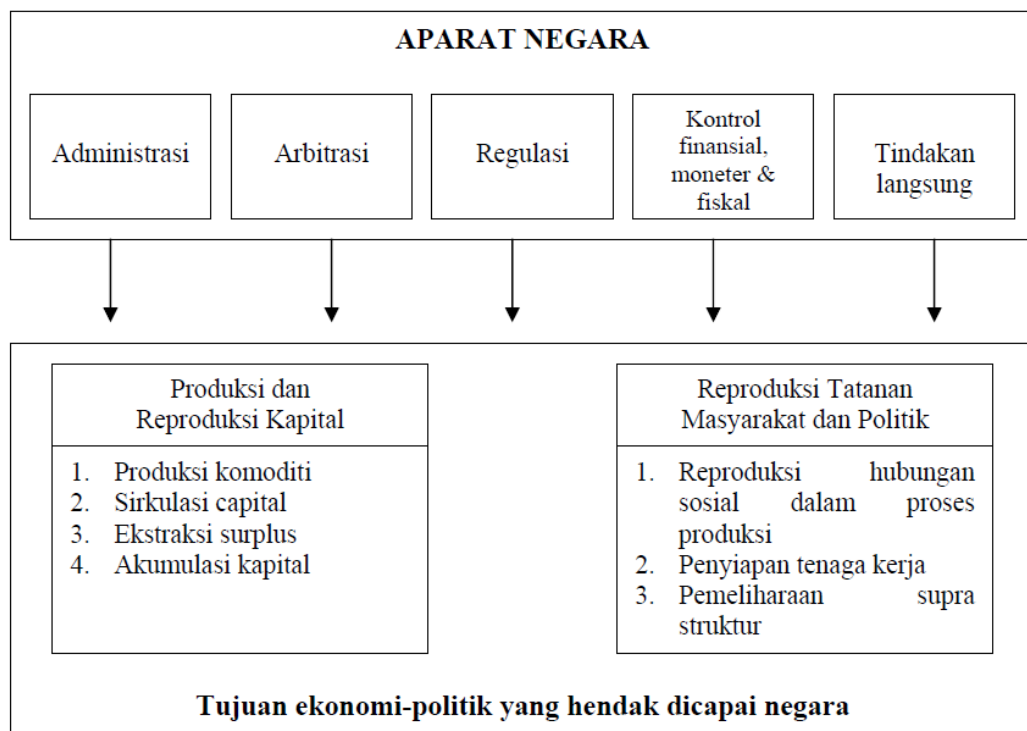
Negara	Ease of Doing Business Rank	Starting a Business	Dealing with Construction Permits	Getting Electricity	Registering Property	Getting Credit	Protecting Investors	Paying Taxes	Trading Across Borders	Enforcing Contract	Resolving Insolvency
Singapore	1	3	3	6	28	3	2	5	1	12	4
Malaysia	6	16	43	21	35	1	4	36	5	30	42
Thailand	18	91	14	12	29	73	12	70	24	22	58
Brunei Darusalam	59	137	46	29	116	55	115	20	39	161	48
Vietnam	99	109	29	156	51	42	157	149	66	46	149
Philippines	108	170	99	33	121	86	128	131	42	114	100
Indonesia	120	175	88	121	101	86	52	137	54	147	144
Cambodia	137	184	161	134	118	42	80	65	114	162	163
Lao PDR	159	85	96	140	76	159	187	119	161	101	189
Myanmar	182	189	150	126	154	170	182	107	113	188	155

Sumber: The World Bank 2013

2.1.6. Pemberdayaan Aparatur Negara

Sejarah perkembangan birokrasi di berbagai negara di Dunia Ketiga menunjukkan bahwa ia diciptakan lebih untuk menanggapi kebutuhan akan pengendalian. Ia bukan muncul semata-mata akibat dari kompleksitas fungsional masyarakat modern. administrasi. Ini adalah gambaran kaum liberal abad 18 mengenai pemerintah yang pasif dan netral. Ia hanya melaksanakan pekerjaan administratif, mencatat statistik dan menyimpan arsip. Kadang-kadang ia digambarkan sebagai "tukang jaga malam". Kalau masyarakat sibuk bekerja, negara tidak boleh ikut campur; tetapi kalau masyarakat "tidur" negara harus menjamin keamanan mereka. Ketika negara semakin aktif, ia melakukan fungsi arbitrase dan regulasi. Di sini ia aktif menerapkan kekuasaan sebagai polisi dan menyelesaikan persengketaan antar berbagai kelompok dalam masyarakat dan mencoba mengendalikan kegiatan kelompok-kelompok masyarakat itu sehingga tidak menimbulkan konflik terbuka.

Gambar 2.2. menunjukkan bahwa birokrasi sebagai aparat negara memiliki lima kelompok fungsi dengan derajat keaktifan yang berbeda. Fungsi paling sederhana dengan tingkat keaktifan paling rendah adalah sekedar melakukan



Gambar 2.2. Bidang-bidang Kegiatan dan Intervensi negara (Weaver, 1984).

Dalam tahap perkembangan berikut, negara menjadi lebih aktif dalam kehidupan ekonomi dengan menerapkan pengendalian finansial, moneter dan fiskal. Pemerintah lebih aktif mempengaruhi pasar konsumen, volume uang yang beredar dalam masyarakat dan pasok kapital. Misalnya, memberi subsidi suku bunga uang rendah agar investor tertarik melakukan investasi, menetapkan anggaran belanja negara dengan tujuan merangsang produksi barang dalam negeri, menetapkan pajak progresif demi pemerataan, dan sebagainya. Tindakan birokrasi yang paling efektif adalah melakukan tindakan langsung. Dalam hal ini negara menggunakan sumberdayanya untuk langsung menangani kegiatan

ekonomi maupun militer. Kalau suatu komoditi dinilai sangat strategis bagi kepentingan nasional, negara turun tangan langsung dalam bisnis komoditi tersebut. Lima fungsi ini berkembang menjadi instrumen kekuasaan pemerintah untuk mengintervensi kegiatan masyarakat.

Instrumen-instrumen kebijaksanaan negara itu digunakan untuk mencapai dua tujuan umum: (1) produksi dan reproduksi kapital, dan (2) reproduksi tatanan masyarakat politik. Tujuan pertama itu meliputi upaya birokrasi mendorong peningkatan produksi barang dan jasa, percepatan sirkulasi kapital, efisiensi ekstraksi surplus dan peningkatan akumulasi kapital. Di sisi lain, tujuan kedua, yaitu reproduksi tatanan masyarakat dan politik, mengharuskan pemerintah untuk menjamin bahwa hubungan sosial yang mendasari proses produksi bisa dilestarikan, kebutuhan akan tenaga kerja selalu bisa dilestarikan, kebutuhan akan tenaga kerja selalu bisa terpenuhi, suprastruktur harus tetap stabil dan kedaulatan politik harus tetap dipertahankan.

Pemberdayaan merupakan alat yang penting untuk memperbaiki kinerja pegawai sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Makmur (2003) yang menyatakan bahwa keuntungan utama adanya upaya pemberdayaan adalah peningkatan kinerja dan hasil semakin besar pula karena setiap anggota masyarakat dan aparatur pemerintah merasa memiliki rasa tanggungjawab. Karena itu, dengan pemberdayaan, pegawai yang merasa diberdayakan akan dapat meningkatkan kepribadian, prestasi kerja serta dapat meningkatkan disiplin kerja yang tinggi. Hal ini didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Nisjar (dalam

Sedarmayanti, 2003), bahwa pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendelegasian wewenang, pemberian wewenang, sehingga diharapkan orang lebih fleksibel, efektif, inovatif, kreatif, etos kerja tinggi yang pada akhirnya produktivitas organisasi menjadi meningkat.

Pemberdayaan berasal dari kata *empowering*, asal katanya adalah *power* yang artinya *control, authority, dominion*. Awalan *emp* artinya *to put on to* atau *to cover with* jelasnya *more power*. Jadi *empowering is passing on authority and responsibility* yaitu lebih berdaya dari sebelumnya dalam arti wewenang dan tanggungjawabnya termasuk kemampuan individual yang dimilikinya. Dari penjelasan ini jelaslah bahwa pemberdayaan adalah suatu konsep yang mengandung makna perubahan yang terjadi pada diri seseorang atau dengan kata lain pemberdayaan bertujuan mengangkat harga diri seseorang, dimana dalam kesehari-hariannya dalam melakukan pekerjaan tidak lagi ketergantungan dengan pimpinan serta memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini ada hubungannya dengan profesionalisme yang pada awalnya selalu dimiliki oleh individu. Oleh karenanya *empowerment* terjadi manakala “*when power goes to employees who then experience a sense of ownership and control over*” (Brown dalam Hendrayady, 2006) yang maknanya adalah peningkatan tanggungjawab pegawai. “*Empowered individuals know that their jobs belong to them. Given a say in how things are done, employees feel more responsible. When they feel responsible, they show more initiative in their work, get more done, and enjoy their work more*” (William dalam Hendrayady, 2006). Maknanya apabila pegawai merasa bertanggungjawab maka mereka akan menunjukkan lebih

mempunyai inisiatif, hasil pekerjaannya lebih banyak dan mereka akan lebih menikmati pekerjaannya. Dengan demikian makna dari pemberdayaan menurut penulis adalah memberikan kewenangan penuh kepada seseorang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki untuk melakukan tugas dan fungsinya secara bertanggungjawab. Untuk memperoleh hasil yang optimal mengenai pemberdayaan menurut Handoko dan Tjiptono (dalam Said, 2003), dibutuhkan lima strategi sebagai berikut :

- 1) *No Discretion*, menggambarkan tugas yang sangat rutin dan repetitif. Pegawai tidak ikut merancang pekerjaan. Pemantauannya pun diserahkan kepada orang lain. Dengan demikian, tidak terdapat wewenang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan *job content* dan *job context*.
- 2) *Task Setting*, yaitu pegawai diberikan tanggungjawab penuh terhadap keputusan atas *job content* dan sedikit tanggungjawab atas *job context*. Pegawai diberdayakan dalam membuat keputusan mengenai cara terbaik untuk merampungkan tugas yang diberikan. Dalam hal ini manajemen menetapkan misi dan tujuan, sedangkan pegawai diberdayakan untuk mengupayakan cara terbaik untuk mewujudkannya.
- 3) *Participatory Empowerment*, dimana pegawai dilibatkan dalam sebagian pengambilan keputusan atas *job content* maupun *job context*. Mereka dilibatkan dalam identifikasi masalah, pengembangan alternatif, dan rekomendasi alternatif dalam *job content*. Mereka juga dilibatkan untuk

aktivitas yang sama di dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan *job context*.

- 4) *Mission Defining*, dimana pegawai diberdayakan untuk memutuskan *job context* saja.
- 5) *Self-Management*, yaitu memberikan wewenang penuh kepada para pegawai untuk mengambil keputusan mengenai *job content* dan *job context*. Untuk itu dibutuhkan kepercayaan atas kemampuan pegawai untuk menggunakan *empowerment* tersebut guna meningkatkan efektivitas organisasi, dilain pihak diperlukan pula keterlibatan tinggi dari para pegawai dalam pengembangan misi dan tujuan organisasi.

Dari berbagai literatur sekurang-kurangnya ada enam manfaat dari pemberdayaan:

- 1) Meningkatkan kualitas, inovasi, loyalitas, rasa berprestasi dan produktivitas pegawai.
- 2) Meningkatkan kreativitas dan komitmen para pegawai.
- 3) Salah satu aspek penting bagi keberhasilan masa transisi dari organisasi birokratik ke organisasi yang berdasarkan tim.
- 4) Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.
- 5) Alat penting untuk memperbaiki kinerja melalui penyebaran pembuatan keputusan dan tanggung jawab karena mendorong keterlibatan para pegawai.

- 6) Dapat menyadarkan, mendukung, mendorong, dan membantu mengembangkan potensi yang terdapat pada diri individu sehingga menjadi manusia mandiri tetapi tetap berkepribadian

Untuk mewujudkan pemberdayaan aparatur guna meningkatkan kinerja organisasi menurut Said (2003), perlu diterapkan suatu solusi etika bekerja dan nilai dalam kepegawaian dengan pendekatan 6 dasar sebagai berikut :

- 1) Nilai Dasar Personal (*Basic Personal Values*) yang meliputi :
 - a) Kepercayaan; kecurigaan antara sesama pegawai, dalam segala aspek perlu dihilangkan, sehingga dapat menciptakan sinergi dalam melakukan pekerjaan.
 - b) Bertanggungjawab; karena rasa saling curiga tidak ada lagi diantara pegawai, sehingga memungkinkan semua pegawai merasa memiliki, sekaligus merasa bertanggungjawab terhadap semua kegiatan organisasi.
 - c) Bersungguh-sungguh; pegawai dalam menghadapi tugas dan tanggungjawab yang diembannya, bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi.
 - d) Pengabdian; dalam aspek pengabdian disini karena semua pegawai merasa diberdayakan; maka tugas-tugas yang diberikan dijadikan sebagai suatu tugas pengabdian yang menuntut pengorbanan.
 - e) Ketertiban; dalam ketertiban disini segala penugasan yang diberikan secara tertib dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

- f) Bekerjasama; setiap permasalahan yang terjadi selalu dilaksanakan secara bersama-sama tanpa sesuatu beban yang berlain dan perlakuan dan pengakuan yang khusus dari hasil yang dicapai.
 - g) Bersih Diri; karena adanya kerjasama yang baik diantara pegawai, memungkinkan saling mengawasi satu sama lain guna menciptakan pemerintahan yang bersih.
 - h) Rajin atau Tekun; karena merasa memiliki sikap kerajinan menjadi sesuatu kebutuhan setiap pegawai.
 - i) Lemah Lembut; nampak keramah tamahan dalam memberikan pelayanan.
- 2) Nilai yang Berfokus pada Kebiasaan (*Custom-Focussed Values*) meliputi:
- a) Mulia; dalam melakukan aktivitasnya menunjukkan pegawai yang patut dihargai, karena dalam bekerja selalu menjaga konsistensi tindakan yang dilakukan.
 - b) Sabar; dalam memberikan pelayanan maupun dalam menghadapi permasalahan selalu mengutamakan kesabaran daripada emosional yang tidak mencerminkan sebagai pegawai.
 - c) Sopan; dalam berkomunikasi dengan orang lain selalu menjaga tatakrama.
 - d) Ramah; rasa bersahabat di antara sesama pegawai maupun terhadap orang yang dilayani.
- 3) Nilai Kepemimpinan (*Leadership Values*) yang meliputi :

- a) Adil; dalam membuat keputusan selalu berusaha menciptakan rasa adil diantara sesama pegawai tanpa adanya kesan diskriminasi.
 - b) Berani; tegas dan tanpa ragu-ragu dalam mengambil keputusan.
 - c) Bersedia Menerima; menghargai setiap pendapat pegawai yang ada dalam lingkungannya maupun yang dilingkungan organisasinya.
- 4) Nilai Profesional (*Professional Values*) yang meliputi :
- a) Pengetahuan; memiliki wawasan yang luas untuk mempertimbangkan segala aspek dalam menentukan kebijakan.
 - b) Memiliki Daya Cipta; selalu berusaha untuk dapat menciptakan sesuatu dan sekaligus mendorong setiap pegawai untuk menemukan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi organisasi.
 - c) Pembaharuan; tidak terikat terhadap sesuatu yang biasanya yang menurut perkembangan tidak sesuai lagi untuk diterapkan.
 - d) Kejujuran Intelektual; tidak mengakui terhadap sesuatu ia ciptakan menurut pikirannya adalah hasil ciptaan dari orang lain.
 - e) Bertanggungjawab; terhadap setiap masalah yang dihadapi selalu dipertanggungjawabkan tanpa harus meminta orang lain untuk bertanggungjawab.
 - f) Tidak Memihak; dalam menyelesaikan permasalahan tidak berdiri disalah satu pihak.
- 5) Nilai Kualitas dan Produktivitas (*Productivity/Quality Values*) :
- a) Berproduksi; hasil yang dicapai selalu dapat dimanfaatkan oleh orang lain.

- b) Berkualitas; hasil yang dimanfaatkan orang lain tersebut sekaligus berkualitas.

6) Nilai Umum (*Universal Values*) :

- a) Berterima Kasih; menyampaikan suatu penghargaan terhadap siapa saja yang diketahui berhasil.
- b) Kepercayaan; selalu memberikan penugasan kepada siapa saja yang memiliki kompetensi tanpa harus mencurigai.
- c) Bertaqwa Kepada Tuhan; saling meyakinkan satu sama lain bahwa segala sesuatu yang dicapai itu adalah berkat kekuasaan Tuhan, dan berusaha menghindari segala perbuatan yang tercela.

Dengan menerapkan nilai-nilai dasar tersebut, maka pemberdayaan aparatur dapat diwujudkan. Menurut Winarty (2003), bahwa langkah-langkah yang diperlukan dalam pemberdayaan aparatur pemerintah pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Dukungan dari pimpinan. Maksudnya adalah seorang pimpinan berkewajiban untuk menggali, menyalurkan, membina serta mengembangkan potensi pegawainya.
- 2) Pendelegasian. Pemberdayaan erat kaitannya dengan pendelegasian, oleh karena itu pendelegasian wewenang hendaknya diarahkan agar bawahan mempunyai inisiatif dalam pengambilan keputusan.
- 3) Bimbingan. Pimpinan sebagai fasilitator dan organisator diharapkan mampu memberikan bimbingan dan pengarahan kepada bawahannya

dalam mengembangkan kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

- 4) Kemampuan sistem informasi. Tersedianya informasi yang lengkap akan mempermudah pegawai dalam pelaksanaan pekerjaannya. Semakin lengkap sistem informasi yang tersedia akan sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan.
- 5) Dukungan dari organisasi. Organisasi dalam hal ini menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam hal pelaksanaan pekerjaan. Baik itu kegiatan diklat, maupun dalam hal penghargaan kepada pegawai, bisa dalam bentuk promosi, mutasi untuk menghindari kejenuhan, serta penempatan pegawai pada jabatan/pekerjaan yang tepat.
- 6) Kinerja organisasi publik. Cara termudah dalam mengukur kinerja sektor publik adalah dengan kriteria efisiensi dan efektivitas.
- 7) Kebutuhan *Learning and Growth* bagi aparatur. Organisasi yang mampu bertahan dimasa depan adalah organisasi yang melakukan proses *learning* dengan baik. Oleh karena itu dituntut upaya yang sungguh-sungguh dari apaatur untuk meningkatkan kemampuan yang dimilikinya.
- 8) Kepuasan Pegawai. Tingkat kepuasan kerja pegawai dapat menunjukkan suatu keadaan emosional yang menyenangkan dengan mana apartur memandang pekerjaan mereka. Sikap ini dicerminkan oleh moral, disiplin kerja, dan prestasi kerja pegawai.
- 9) Motivasi. Kondisi ini tercermin dari banyaknya saran yang disampaikan aparatur, banyaknya saran yang dilaksanakan/direalisasikan, banyaknya

saran yang berhasil guna, serta banyaknya aparatur yang mengetahui dan mengerti visi dan misi organisasi.

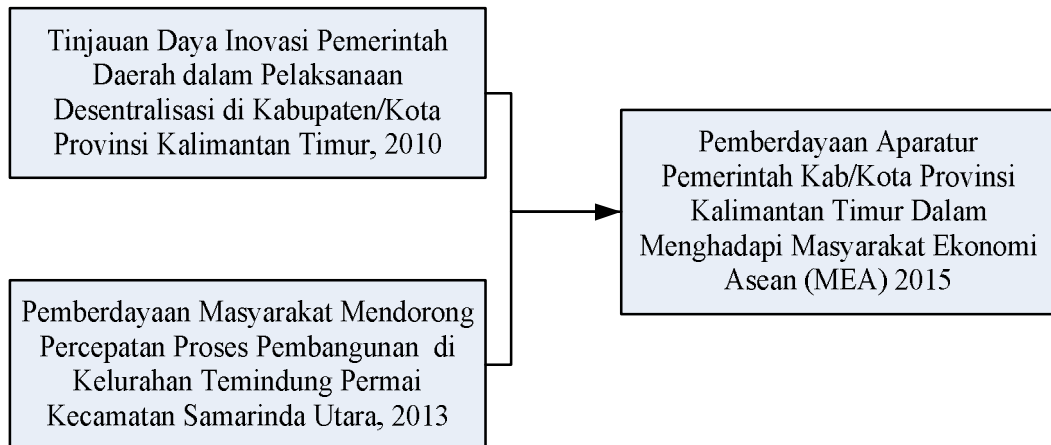
Menurut Anshari (2010), keberhasilan pemberdayaan aparatur negara tergantung pada tingkat kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai faktor utama, namun demikian peran Pemerintah (BKN/PPK) juga sangat menentukan. Oleh karena itu langkah-langkah yang perlu diambil harus tetap berorientasi pada pengembangan kemandirian atau profesionalisme PNS, bukannya membuat ketergantungan, mendikte atau bahkan mematikan potensi yang ada melalui praktek-praktek spoil, kolusi dan inkompetensi. Adapun pendekatan dalam pemberdayaan PNS dapat dilakukan melalui prosedur analisis yang bertumpu pada penggalian potensi dengan berbasis sumberdaya (*Resource-Based Approach*) dan untuk menciptakan serta mengoptimalkan keunggulan yang berbasis sumberdaya (*Resource-Based Advantage*). Pemberdayaan bukan ditekankan pada pemanfaatan sumberdaya semata, tetapi lebih merupakan perpaduan pengembangan antara sumberdaya manusia yang bersifat *tangible*, *intangible*, dan *very intangible* dengan proses pembelajaran (*learning by doing*). Dengan demikian pemberdayaan PNS bukan saja untuk analisis potensi, melainkan juga dalam rangka peningkatan kualitas kinerja dan produktivitas. Oleh karena itu pemberdayaan PNS harus dikaitkan dengan penilaian kinerja.

2.2. Penelitian Terdahulu (*Road Map*)

Untuk mendukung penelitian ini sebelumnya telah dilakukan serangkaian penelitian, antara lain:

Hutauruk (2010) melakukan penelitian yang berjudul Tinjauan Daya Inovasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. Melalui peneliti ini diketahui bahwa: 1) Kemampuan inovasi kabupaten/kota di Kaltim masih relatif rendah, disebabkan aparatur pemerintah belum menangkap akar permasalahan yang ada di masyarakat di daerahnya masing-masing dan adanya dominasi program pembangunan dari pemerintah pusat yang harus dilaksanakan di daerah yang masih bersifat umum. 2) Paradigma aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat belum sepenuhnya dijalankan, disebabkan kurangnya penghargaan atas apa yang dibuat oleh seorang aparatur pemerintah terhadap masyarakatnya.

Terkait dengan peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat, Salasiah (2013) melakukan penelitian berjudul Pemberdayaan Masyarakat Mendorong Percepatan Proses Pembangunan di Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Samarinda Utara diperoleh hasil, antara lain: pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan masyarakat dengan baik yang dilakukan di Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Samarinda Utara, maka ada kecenderungan peningkatan pelaksanaan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik.



Gambar 2.3. Road Map Penelitian Terdahulu

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian diperkirakan membutuhkan waktu selama 3 bulan, yaitu pada bulan Mei hingga Juli 2015 (terhitung dari pelaksanaan studi pendahuluan hingga penyusunan akhir). Kegiatan penelitian ini dibagi menjadi 6 fase, yaitu:

Fase I : Study pendahuluan

Fase II: Pengumpulan data

Fase III: Pengolahan data

Fase IV: Pelaporan

Fase V: Presentasi Hasil Penelitian

Fase VI: Publikasi Hasil Penelitian

Lokus penelitian ini dilaksanakan di 4 (empat) lokasi, yaitu terdiri dari Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kabupaten Berau. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan pertumbuhan investasi yang membutuhkan pelayanan administrasi, teknis dan infrastruktur di daerah.

Tabel 3.1. Jadwal Pelaksanaan kegiatan

Tahapan	Fase Kegiatan	Deskripsi	Bulan ke-1				Bulan ke-2				Bulan ke-3			
			M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
Persiapan	Fase I	Studi Pendahuluan												
		Studi Perpustakaan	■	■										
Pelaksanaan	Fase II	Pengumpulan Data												
		Studi Lapangan			■	■	■							
Penyusunan Laporan Penelitian	Fase III	Pengolahan Data						■	■	■				
		Pelaporan									■			
Ekspose dan Publikasi	Fase V	Presentasi Hasil Penelitian										■		
		Publikasi Hasil penelitian											■	

3.2. Teknik Sampling

Narasumber diambil secara *Purposive Sampling* terhadap aparatur pemerintah Kabupaten/Kota yang bertugas di Bappeda, Dinas Tenaga Kerja, Bagian kepegawaian, Badan Penanaman Modal, dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.

Kriteria dalam menentukan narasumber adalah: 1) mereka yang dianggap kompeten dalam bidang tugas yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik terkait pelaksanaan AFTA 2015 di daerah. 2) bersedia memberikan data yang diberikan, dan 3) memahami pertanyaan-pertanyaan yang ajukan sesuai dengan tujuan penelitian.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi, yaitu gabungan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara

mengamati obyek secara langsung di lokasi studi. Obyek dimaksud menyangkut aktifitas pelayanan yang diberikan pemerintah Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan AFTA 2015. Wawancara dilakukan terhadap narasumber terpilih dengan menggunakan angket yang telah disediakan. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara penelusuran terhadap laporan-laporan, catatan-catatan, foto-foto yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

3.4. Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif model Spradley. Proses penelitian dilakukan dari yang luas, kemudian memfokus dan meluas lagi (Sugiyono, 2013). Analisis model ini dilakukan dengan tahap-tahap yang meliputi: analisis domain, taksonomi, dan komponensial.

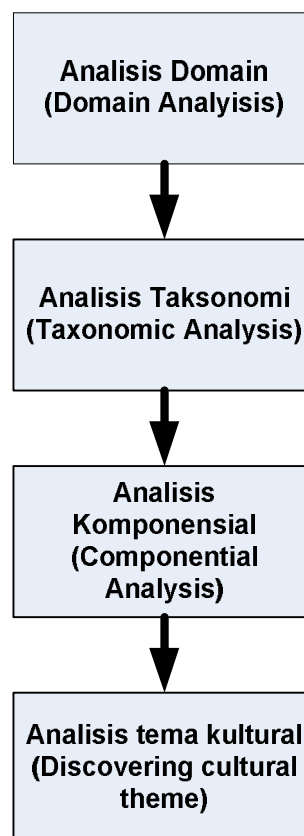
Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Obyek dari penelitian ini dibagi menjadi 4 indikator, yaitu . 1) Kebijakan/program pro AFTA 2015, 2) keadaan Sumberdaya Manusia (Aparatur), 3) Kelembagaan, dan 4) anggaran tersedia. Dalam analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam masih dipermukaan, namun sudah menemukan domain-domian yang diteliti.

Analisis taksonomi, dilakukan untuk menjabarkan indikator-indikator yang terdapat pada domain menjadi lebih rinci lagi. Untuk itu dibutuhkan observasi terfokus terhadap domain-domian yang dimaksud. Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Analisis kompenensial, yaitu melakukan pencarian hal-hal yang bersifat spesifik (berupa: inovasi) dari informasi yang diterima di lokasi studi. Proses analisis dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis tema kultural, yaitu mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan, sehingga membentuk judul penelitian.

Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada teori-teori sosial dan pengalaman peneliti. Selanjutnya penarikan kesimpulan dilakukan atas dasar data tersusun dan keputusan peneliti secara panel. Tahapan analisis dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Tabel 3.1. Tahapan Analisis Data Model Spradley

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Data Penelitian

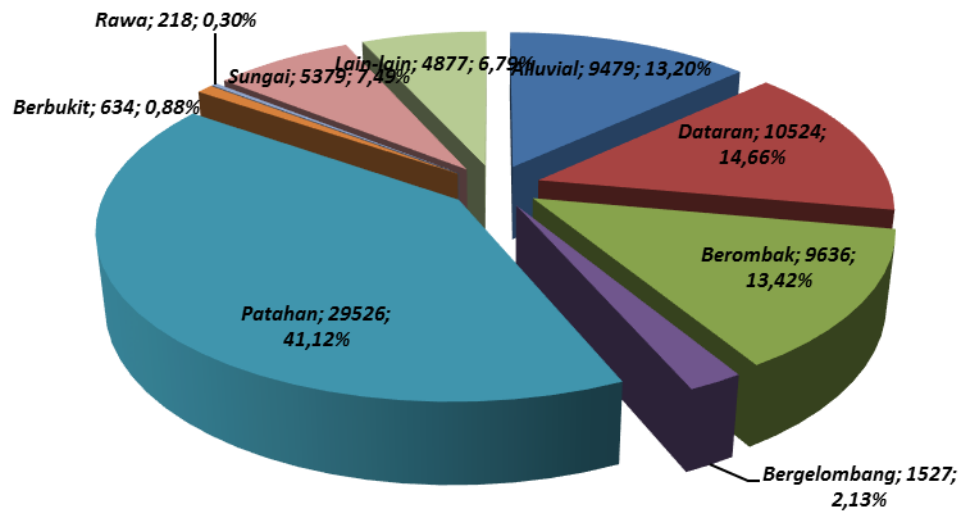
4.1.1. Gambaran Umum Wilayah Studi

4.1.1.1. Keadaan Geografis

Wilayah studi pertama adalah Kota Samarinda. Kota Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kota Samarinda secara astronomis terletak pada posisi antara 117°03'00" – 117°18'14" Bujur Timur dan 00°19'02" – 00°42'34" Lintang Selatan dengan luas wilayah adalah 718 km² berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1987. Suhu minimum berkisar antara 23,9°C dan suhu maksimum berkisar 32,9°C. Kelembaban udara terendah rata-rata 77 persen dan kelembaban udara tertinggi sekitar 86 persen. Kota Samarinda yang beriklim tropis, hujan sepanjang tahun dengan rata-rata curah hujan 201,7 mm/th. Sungai-sungai yang melintas di Kota Samarinda memiliki pengaruh yang cukup besar pada perkembangan kota. Sebagai salah satu pusat perekonomian regional terpenting di Kalimantan Timur, Kota Samarinda memiliki posisi dan kedudukan strategis bagi berbagai kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa serta pemukiman yang berwawasan lingkungan dan hijau. Adanya Sungai Mahakam yang membelah di tengah kota menjadikan kota ini bagai gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur, Luas Wilayah Kota Samarinda adalah 71.800 ha yang terbagi secara administratif semula 6 kecamatan kini menjadi 10 kecamatan

berdasarkan Perda No. 02 tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Sambutan, Samarinda Kota, Sungai Pinang dan Kecamatan Loa Janan Ilir dengan terdiri atas 53 kelurahan. Adapun batas administrasi Kota Samarinda adalah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak (Kutai Kartanegara), Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Anggana dan Sanga-sanga (Kutai Kartanegara), Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan (Kutai Kartanegara), dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak dan Tenggarong Seberang (Kutai Kartanegara).

Berdasarkan topografinya, maka Wilayah Kota samarinda berada di ketinggian antara 0-200 m dpl (di atas permukaan laut), dan hampir 24,17 persen berada di ketinggian 0 – 7 m dpl, umumnya terletak di dekat Sungai Mahakam sekitar 41,10 persen berada dalam ketinggian 7 – 25 m dpl, dan 32,48 persen berada di ketinggian 25 – 100 m dpl. Fisiografi menunjukkan bentuk permukaan bumi dipandang dari faktor dan proses pembentukannya. Proses pembentukan permukaan bumi dijadikan ciri suatu satuan fisiografi. Pembagian bentuk permukaan bumi berdasarkan tipe fisiografinya dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan memudahkan dalam perencanaan penggunaan tanah sehubungan dengan perencanaan pengembangan daerah. Ditinjau dari fisiografinya, Wilayah Kota Samarinda dapat dikelompokan dalam 7 deskripsi masing-masing satuan fisiografi tersebut adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1. Luas Fisiografi Kota Samarinda

- 1) Daerah patahan yakni patahan menurun dan kasar, dengan permukaan yang besar dengan kemiringan tanah sangat bervariasi. Daerah patahan di Kota Samarinda seluas 29526 Ha dengan persentase 41,12 persen, merupakan daerah terluas di Kota Samarinda.
- 2) Daerah rawa pasang surut (*tidal swamp*) yaitu daerah dataran rendah di tepi pantai yang selalu dipengaruhi pasang surut air laut dan ditumbuhi hutan mangrove dan nipah, bentuk wilayah datar dengan variasi lereng kurang dari 2 persen dan perbedaan tinggi kurang dari 2 meter. Seluas 218 Ha daerah Kota Samarinda terdiri atas rawa.
- 3) Daerah dataran alluvial (*alluvial plain*) yaitu daerah dataran yang terbentuk dengan proses pengendapan, baik di daerah muara maupun daerah pedalaman. Kota Samarinda memiliki daerah alluvial seluas 9479 Ha atau 13,20 persen dari luas Kota Samarinda.

- 4) Daerah berombak/bergelombang yakni daerah dengan konfigurasi medan berat ditandai dengan penyebaran daerah perbukitan 8,15 persen. Daerah berombak di Kota Samarinda seluas 9636 Ha, sedangkan daerah bergelombang seluas 1527 Ha.
- 5) Daerah dataran (*plain*) yaitu daerah endapan, dataran karst, dataran vulkanik, dataran batuan beku (*metamorf*) masam, dataran basalt dengan bentuk wilayah bergelombang sampai berbukit, variasi lereng 2 s/d 15.94 persen dengan beda ketinggian kurang dari 50 meter. Kota Samarinda memiliki daerah dataran yang cukup luas setelah daerah patahan, yaitu seluas 10524 Ha atau sebesar 14,66 persen.
- 6) Daerah berbukit (*hill*) yaitu daerah bukit endapan dan ultra basa, system punggung sedimen, metamorf dan kerucut vulkanik yang terpotong dengan pola drainase radial. Bentuk wilayah bergelombang sampai agak bergunung, variasi lereng 16 s/d 60 persen, dengan beda ketinggian antara 50 sampai 150 meter. Daerah berbukit merupakan daerah yang paling jarang ditemui di Kota Samarinda karena hanya seluas 634 Ha atau sebesar 0,88 persen dari wilayah Kota Samarinda.
- 7) Daerah sungai (*river*). Daerah ini berfungsi sebagai daerah reterdam, daerah pengendali atau waterponds. Kota Samarinda memiliki daerah sungai sebesar 5379 Ha atau 7,49 persen dari luas wilayah.

Struktur geologi di wilayah Kota Samarinda diketahui berdasarkan hasil survey dan atau pemetaan geologi yang dimuat dalam buku “*Geology of Indonesia, Volume IA*” oleh R.W. Van Bemmelen, 1949, pada umumnya berumur

Pratertier hingga Kwartar. Beberapa wilayah geologi telah mengalami perubahan yang ditandai dengan adanya patahan. Formasi ini terdiri dari grewake, batu pasir kwarsa, batu gamping, batu lempeng dan tufa dasitik dengan sisipan batu bara. Beberapa formasi geologi yang terdapat di wilayah Kota Samarinda di antaranya adalah:

Tabel 4.1. Luas Masing-Masing Formasi Geologi Kota Samarinda

No	Formasi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Kampung Baru Beds	11.314	11,34
2.	Balikipapan Beds	33.953	53,29
3.	Pulau Balang Beds	16.977	26,65
4.	Pemaluan Beds	9.556	8,72
Total		71.800	100.00

Sumber : BPS Kota Samarinda

Berdasarkan kondisi hidrologinya Kota Samarinda dipengaruhi oleh sekitar 20 Daerah Aliran Sungai (DAS). Sungai Mahakam adalah sungai utama yang membelah Kota Samarinda dengan lebar antara 300-500 meter, sungai-sungai lainnya adalah anak-anak sungai yang bermuara di sungai Mahakam yang meliputi :

- 1) Sungai Karang Mumus dengan luas DAS sekitar 218.60 Km
- 2) Sungai Palaran dengan luas DAS 67.68 Km
- 3) Anak sungai lainnya antara lain, Sungai Loa Bakung, Loa Bahu, Bayur, Betepung, Muang, Pampang, Kerbau, Sambutan, Lais, Tas, Anggana, Loa Janan, Handil Bhakti, Loa Hui, Rapak Dalam, Mangkupalas, Bukuan, Ginggaang, Pulung, Payau, Balik Buaya, Banyuur, Sakatiga, dan Sungai Bantuas.

Sesuai dengan kondisi iklim di Kota Samarinda yang tergolong dalam tipe iklim Tropika Humida, maka jenis-jenis tanah yang terdapat di daerah inipun tergolong kedalam tanah yang bereaksi masam. Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kota Samarinda, menurut Soil Taxonomy USDA tergolong ke dalam jenis tanah : Ultisol, Entisol, Histosol, Inceptisols dan Mollisol atau bila menurut Lembaga Penelitian Tanah Bogor terdiri dari jenis tanah : Podsolik, Alluvial, Organosol. Tanah Podsolik (Ultisol) merupakan jenis tanah yang arealnya terluas di Kota Samarinda mencapai 54,71 persen dan masih tersedia untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian. Persediaan air di daerah ini umumnya cukup tersedia dari curah hujan yang tinggi. Penggunaan tanah dari jenis tanah ini sebagai daerah pertanian, biasanya memungkinkan produksi yang baik pada beberapa tahun pertama selama unsur-unsur hara di permukaan belum habis melalui proses biocycle.

Wilayah studi kedua adalah Balikpapan. Secara administratif luas keseluruhan Kota Balikpapan menurut RTRW 2011-2031 adalah 857,81 Km², yang terdiri dari luas daratan 538,44 Km² dan luas lautan 319,37 Km². Secara geografis Kota Balikpapan terletak pada posisi 1 LS – 11 dan diantara 116 50' BT - 117 5 BT dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara, Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makasar, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh

tujuh) Kelurahan. Secara umum Kota Balikpapan berada pada ketinggian 0 sampai > 100 meter di atas permukaan laut. Namun dari ketinggian tersebut, terbesar berada pada ketinggian 20-100 mdpl.; seluas 20.090,57 ha atau 51,66 persen dari luas wilayah total Kota Balikpapan. Sedangkan yang berketinggian 10-20 mdpl.; seluas 17.260 ha atau 34,17 persen dari luas wilayah. Sedangkan yang berketinggian 0-10 mdpl.; seluas 6.980 Ha atau 13 persen dari luas wilayah.

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari kawasan perbukitan yang bergelombang \pm 85 persen dengan jenis tanah podsolik merah kuning. Sifat jenis tanah ini berlapisan topsoil tipis, struktur tanahnya mudah tererosi. Sedangkan +/- 15 persen merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan. Jenis tanah wilayah ini umumnya adalah alluvial. Dari sisi topografis sebagian besar wilayah Kota Balikpapan merupakan kawasan perbukitan yang mempunyai kelerengan antara 15 - 40 persen, seluas 21.305,57 Ha atau 42,33 persen dari luas wilayah keseluruhan. Kota Balikpapan beriklim tropis, mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah yang ada di Kalimantan Timur pada umumnya, yaitu tidak adanya perbedaan antara musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada Bulan Mei sampai Bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada Bulan Nopember sampai dengan Bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan (pancaroba) pada bulan-bulan tertentu. Seiaian itu, karena letaknya di daerah katulistiwa maka iklim di Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh angin Muson, yaitu angin Muson barat Nopember - April dan Angin Muson Timur Mei - Oktober. Secara umum Kota Balikpapan beriklim

panas dengan suhu udara sepanjang tahun berkisar dari 21,7°C sampai 34,7°C. Selain itu, sebagai daerah beriklim tropis, Kota Balikpapan mempunyai kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar antara 82-91 persen. Curah hujan di Kota Balikpapan sangat beragam. Rata-Rata curah hujan tertinggi dan terendah selama tahun 2009 yang tercatat pada stasiun meteorologi Kota Balikpapan masing-masing sebesar 64,4 mm dan sebesar 338,0 mm. Keadaan angin di Kota Balikpapan pada tahun 2009 yang dipantau dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika Kota Balikpapan, menunjukkan bahwa kecepatan angin berkisar antara 4 sampai 6 knot. Kecepatan angin paling tinggi 6 knot terjadi pada bulan Juli sedang terendah 4 knot terjadi pada bulan Maret, April, Oktober, November dan Desember.

Wilayah studi ketiga adalah Kota Bontang. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Bontang memiliki posisi astronomi di antara 117⁰23' – 117⁰38' Bujur Timur dan antara 00⁰1' – 00⁰12' Lintang Utara. Luas wilayahnya 497,57 km² yang terdiri dari wilayah laut seluas 349,77 km² (70,30%) dan wilayah darat seluas 147,80 km² (29,70%). Wilayah tersebut terbagi menjadi 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Luas masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Selatan seluas 104,40 km², Kecamatan Bontang Utara seluas 26,20 km², dan Bontang Barat seluas 17,20 km². Berdasarkan letak administratifnya, Kota Bontang memiliki batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur; Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan hasil delinasi tahun 2011, disampaikan bahwa penggunaan tanah terbesar masih berupa semak belukar sebesar 6.870,98 hektar (46,49%). Penggunaan lainnya terdiri dari hutan sejenis seluas 2.764,48 hektar (18,70%), bakau seluas 1.115,51 hektar (7,55%), tambak seluas 328,18 ha (2,19), pekarangan seluas 972,87 hektar (6,58%), rumah/bangunan gedung seluas, 1.355,56 hektar (9,170) dan fasilitas umum seluas 562,43 hektar (3,13%). Penggunaan wilayah laut dan pesisir Kota Bontang cukup kompleks. Pada wilayah tersebut telah terdapat banyak aktivitas masyarakat maupun swasta yang menjadikan wilayah lautnya menjadi ramai. Secara umum, aktivitas yang ada di laut dan pesisir Kota Bontang terdiri dari pelayaran tradisional, nasional dan internasional, penangkapan ikan, budidaya perikanan dan permukiman di atas.

Wilayah Kota Bontang berupa permukaan tanah yang datar, landai, berbukit dan bergelombang. Secara topografi kawasan Kota Bontang memiliki ketinggian antara 0-120 meter dpl dengan kemiringan lereng yang bervariasi. Kemiringan lahan 0-2 persen (datar) mempunyai luasan 7.211 ha atau 48,79 persen. Kemiringan lahan 3-15 persen seluas 4.001 hektar atau 27,07 persen. kemiringan yang curam (16-40%) sebesar 24,14 persen atau 3.568 hektar. Wilayah Kota Bontang memiliki iklim tropis mempunyai seperti iklim di wilayah Indonesia lainnya, yaitu kemarau dan penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada Mei sampai dengan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada November sampai dengan April. Selain itu, iklim Kota Bontang yang terletak di daerah khatulistiwa dipengaruhi oleh angin Muson Barat (November – April) dan angin Muson Timur (Mei – Oktober). Namun, beberapa tahun terakhir ini

perubahan dari kemarau ke musim hujan tidak jelas sehingga curah hujan di Kota Bontang cenderung rata sepanjang tahun. Suhu udara di Kota Bontang berkisar antara 23,00 – 34,00oC. Sedangkan kelembaban udara di Kota Bontang rata-rata 51,00 – 98,00 persen dengan kecepatan 13 angin berkisar antara 16,00 – 18,00 knot. Rata-rata catatan curah hujan pada kisaran 160,00 – 171,40 mm/th. Kondisi ini menggambarkan curah hujan di Kota Bontang cukup besar.

Wilayah studi keempat adalah Kabupaten Berau. Kabupaten Berau terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis posisi Kabupaten Berau berada di 116' bujur timur – 119' bujur timur dan 1' lintang utara – 2'33" lintang selatan. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulungan di sebelah Utara, Kabupaten Kutai Timur di sebelah Selatan, Kabupaten Kutai Kartanegara – Kabupaten Malinau – dan Kabupaten Kutai Barat di sebelah Barat, serta Selat Makassar di sebelah Timur. Kabupaten Berau memiliki luas wilayah 34.127 Km², yang terdiri dari daratan 21.951,71 km² dan lautan 11.962,42 km².

Secara administrasi, Kabupaten Berau terdiri atas 13 kecamatan, yaitu Tanjung redeb, Gunung Tabur, Teluk Bayur, Segah, Kelay, Sambaliung, Derawan, Maratua, Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih dan Biduk-biduk. Kecamatan-kecamatan di kabupaten Berau berada di daerah pedalaman hingga pesisir pantai.

Tabel 4.2. Gambaran Umum Wilayah Studi

Deskripsi	Kota Samarinda	Kota Balikpapan	Kota Bontang	Kabupaten Berau
Letak Geografis	117°03'00" – 117°18'14" Bujur Timur dan 00°19'02" – 00°42'34" Lintang Selatan	116°50' Bujur Timur - 117°5' Bujur Timur dan 1°Lintang Selatan - 11° Lintang Selatan	117°23' Bujur Timur - 117°38' Bujur Timur dan 00°01' Lintang Utara - 00°12' Lintang Utara	116' Bujur Timur - 119' Bujur Timur dan 1' Lintang Utara - 2'33' Lintang Selatan
Batas Wilayah				
Sebelah Utara	Kec. Muara Badak (Kutai Kartanegara)	Kab. Kutai Kartanegara	Kab. Kutai Timur	kab. Bulungan
Sebelah Selatan	kec. Loa Janan (kutai kartanegara)	Selat Makassar	Kab. Kutai Kartanegara	Kab. Kutai Timur
Sebelah Barat	Kec. Muara Badak dan Tenggarong Seberang (Kutai Kartanegara)	Kab. Penajam paser Utara	Kab. Kutai Kartanegara	Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Malinau, Kab. Kutai Barat
Sebelah Timur	Kec. Anggana dan Sanga-sanga (Kutai Kartanegara)	Kab. Kutai Kartanegara	Selat Makassar	Selat Makassar
Luas wilayah (km²)	718	857,81	497,57	34.127,17
Daratan (Km²)	718	538,44	147,80	21.951,71
Perairan (Km²)		319,37	349,77	12.175,46
Topografi (m dpl)	0 – 200	0 - > 100	0 - 120	0 - > 1.000
Jumlah Penduduk (jiwa) tahun 2013	781.184	599.685	163.651	201.565
Kepadatan Penduduk (jiwa/Km²)	1.088,00	699,09	328,90	5,91

Sumber: Profil Daerah, 2014

4.1.1.2. Demografi

Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Sebutan *pertumbuhan penduduk* merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia.

Penduduk Kota Samarinda mengalami pertumbuhan yang sangat pesat berdasarkan hasil sensus tahun 2010. Pertumbuhan penduduk pada saat itu mencapai angka tertinggi dalam 10 tahun terakhir, yaitu mencapai 19,71 persen dari tahun 2009 yang ketika itu masih sebesar 607.675 jiwa. Sementara pada tahun berikutnya, rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Samarinda berkisar 3-4 persen. Komposisi penduduk Kota Samarinda masih didominasi oleh laki-laki. Rata-rata 5 tahun terakhir, rasio jenis kelamin di Kota Samarinda menandakan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 107 penduduk laki-laki. Komposisi penduduk Kota Samarinda dari sisi usia sangat bervariasi pada tahun 2014. Usia 4-15 tahun mencapai 217.344 jiwa, usia 16-64 tahun mencapai 600.194 jiwa, dan usia >65 tahun 27.365 jiwa. Dari komposisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa usia produktif yaitu 16-64 tahun mendominasi

penduduk Kota Samarinda dibanding usia non-produktif yaitu usia 4-15 tahun dan >65 tahun. Sehingga dapat dihitung angka rasio ketergantungan (*ratio dependency*) Kota Samarinda sebesar 40,77 persen, yang artinya setiap 100 penduduk produktif usia 16-64 tahun harus menanggung 40 penduduk usia non-produktif. Rasio ketergantungan dapat dijadikan suatu nilai untuk mengukur tingkat perekonomian penduduk di Kota Samarinda.

Penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2010 sebesar 614.681 jiwa. Sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur dan kota transit, Kota Balikpapan mengalami pertumbuhan penduduk yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan luas wilayah sekitar 503,3 Km², maka kepadatan penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2010 adalah 1221 jiwa/Km². Distribusi jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Balikpapan Selatan, yaitu mencapai jumlah 223.041 jiwa atau mencapai 36,28 persen dari seluruh jumlah penduduk Kota Balikpapan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Timur, dengan jumlah penduduk sekitar hampir 65.868 jiwa atau sekitar 10,72 persen jumlah penduduk Kota Balikpapan.

Selanjutnya penduduk Kota Balikpapan dapat dianalisis menurut struktur umurnya. Struktur umur ini adalah informasi yang sangat penting karena berkaitan dengan perkembangan persentase kelompok sasaran pembangunan. Misalnya proporsi penduduk pada tingkat pendidikan dasar, menengah, tinggi, remaja, usia kerja (produktif), usia lanjut. Besaran komposisi penduduk ini akan menentukan kebutuhan layanan pada setiap kelompok. Bila dilihat dari struktur usia penduduk Kota Balikpapan, yang tergolong menonjol adalah usia masa awal usia kerja (25-

34 tahun) dan pada usia pendidikan tinggi (20-24 tahun). Pada kedua kelompok ini terlihat pola lonjakan bila dibandingkan dengan usia pendidikan dasar-menengah. Artinya secara normal sebenarnya strukturnya akan semakin menyempit mulai dari usia balita sampai dengan usia lanjut. Lonjakan pada usia tersebut di atas, mengindikasikan bahwa di Kota Balikpapan terjadi migrasi masuk yang sangat besar, yaitu penduduk pendatang yang mencari kerja di Kota Balikpapan. Struktur seperti ini patut mendapat perhatian, karena kemungkinan akan selalu berulang. Antisipasi atas peristiwa seperti ini harus selalu dilakukan dalam mengupayakan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Balikpapan.

Berdasarkan Kantor Pusat Statistik Kota Bontang, bahwa Jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2013 sebesar 163.651 jiwa dengan laju pertumbuhan 5,85 persen per tahun. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2013 terdapat di kecamatan Bontang Utara sebesar 2.780 jiwa per km² disusul kecamatan Bontang Barat sebesar 1.573 jiwa per km² dan kecamatan Bontang Selatan sebesar 611 jiwa per km². Komposisi penduduk Kota Bontang tahun 2013 terdiri atas laki-laki 85.597 jiwa dan perempuan 78.054 jiwa. Selama lima tahun terakhir menjelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (RJK) pada tahun 2013 adalah 109,66 yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 110 orang penduduk laki-laki.

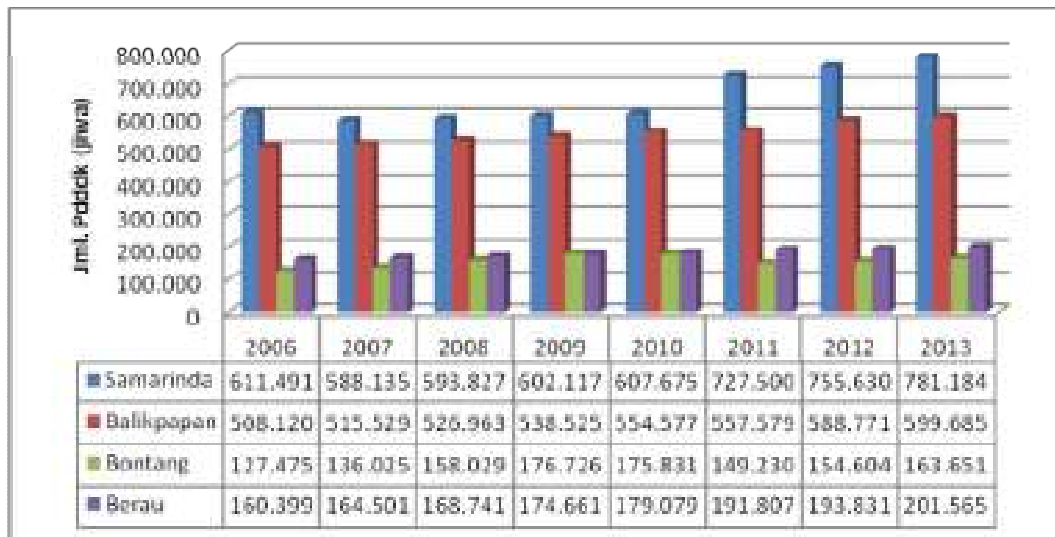
Berdasarkan pertumbuhan penduduk menurut kelompok umur tergambar bahwa pertumbuhan Kota Bontang didominasi oleh penduduk usia produktif. Hal ini sebagai gambaran bahwa pertumbuhan penduduknya bukan alami tetapi akibat

migrasi. Besar dugaan bahwa hal ini terjadi karena kondisi Kota Bontang sebagai daerah industri yang cenderung dibanjiri oleh penduduk pencari kerja. Kehadiran pendatang dari berbagai penjuru tanah air ke Kota Bontang menjadikan penduduk menjadi heterogen baik dari segi suku maupun agama. Menurut agama yang dianut, penduduk Kota Bontang mayoritas beragama Islam yang jumlahnya mencapai 87,42 persen. Berikutnya adalah penduduk yang beragama Kristen sebanyak 10,28 persen, Katolik sebanyak 2,00 persen, Hindu sebanyak 0,23 persen dan Budha 0,08 persen. Perbedaan suku dan agama tersebut menyebabkan Kota Bontang kaya akan adat istiadat dan kebudayaan daerah. Komposisi penduduk Kota Bontang ditinjau dari jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2013 (umur 15 tahun keatas) yaitu SD/ sederajat ke bawah sebanyak 34.127 orang; tamat SLTP/ sederajat sebanyak 23.087 orang; dan SLTA/ sederajat ke atas sebanyak 47.071 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Bontang yang berumur 15 tahun ke atas sebagian besar telah lulus SLTA/ Sederajat.

Pada tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Berau 193.831 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 sebesar 191.807 terdapat penambahan jumlah penduduk yang diakibatkan oleh kelahiran, dan penduduk yang datang dari daerah lain. Penambahan penduduk sebesar 2.024 jiwa atau sebesar 1,05 persen. Penambahan atau perkembangan penduduk tak sebesar tahun 2011 yang sebesar 7,11 persen. Kenaikan dan perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Berau disebabkan adanya daya tarik bagi pencari kerja khususnya di sektor pertambangan. Pola persebaran penduduk Kabupaten Berau

menurut luas wilayah sangat timpang, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan yang mencolok, terutama antar kecamatan pedalaman dengan kecamatan ibu kota kabupaten. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar seperti Kecamatan Kelay, Kecamatan Segah dan Kecamatan Maratua memiliki tingkat kepadatan yang jauh lebih kecil dari kepadatan kecamatan lainnya yaitu masing-masing sebesar 0,75 jiwa/Km², 1,77 jiwa/Km² serta sebesar 0,77 jiwa/Km². Sedangkan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Tanjung Redeb sebanyak 2.848,36 jiwa/ Km². Hal ini karena Kecamatan Tanjung Redeb merupakan ibu kota Kabupaten Berau dimana sarana dan prasarana kehidupan cenderung lebih lengkap. Kecamatan lain yang memiliki kepadatan yang cukup tinggi adalah Kecamatan Teluk Bayur sebesar 128,06 jiwa/Km². Sementara itu kepadatan per keluarga Kabupaten Berau sebesar 3,24 jiwa per rumah tangga. Hampir setiap kecamatan menunjukkan angka yang relatif sama kepadatannya, masih berkisar 3 sampai dengan 4 jiwa/rumah tangga. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Berau pada tahun 2012 mengalami perlambatan kenaikan yaitu 1,06 persen. Kenaikan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Berau ini disebabkan adanya migrasi masuk yang cukup tinggi. Jika dilihat dari perbandingan antara penduduk laki – laki dan perempuan di Kabupaten Berau, maka penduduk laki-laki masih lebih banyak dibanding penduduk perempuan bahkan di setiap Kecamatan hal ini dapat dilihat dari angka perbandingan atau sex ratio. Sex ratio menunjukkan jumlah laki-laki diantara seratus penduduk perempuan. Kabupaten Berau pada tahun 2012

memiliki perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebesar 116,61 artinya terdapat 116.61 orang laki-laki ada 100 orang perempuan.

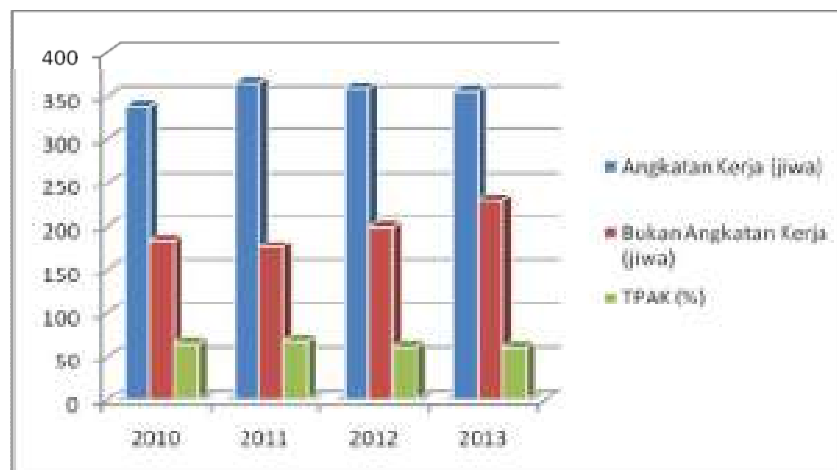


Gambar 4.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang dan kabupaten Berau Tahun 2006 - 2013

Tingginya capaian investasi Kota Samarinda selama 2 tahun terakhir serta tersedianya berbagai fasilitas pendidikan memberikan efek pada meningkatnya arus migrasi dengan berbagai kepentingan, mulai dari pendidikan hingga pekerjaan. Fenomena yang banyak terjadi di berbagai kota, tidak hanya di Kota Samarinda, adalah menumpahnya para pencari kerja namun tidak diimbangi dengan skill dan kompetensi yang dibutuhkan, sehingga tidak seluruhnya mampu terserap menjadi tenaga kerja dan berujung pada terjebakannya mereka pada sektor informal. Kondisi inilah yang memicu peningkatan angka pengangguran, apalagi dengan adanya kondisi bahwa banyak migran yang masuk merupakan penduduk usia angkatan kerja. Sehingga pertumbuhan angkatan kerja dengan penyerapan tenaga kerja menjadi tidak seimbang. Pada tahun 2013, angka pengangguran Kota

Samarinda mencapai 8,57 persen, ada penurunan sebesar 1,14 persen dari tahun 2012 yang kala itu masih 9,71 persen. Dengan semakin banyaknya pusat perdagangan dan perhotelan di Kota Samarinda, di target pada tahun 2014 angka pengangguran di Kota Samarinda dapat turun hingga mencapai 8,46 persen.

Bila melihat angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), terlihat bahwa TPAK Kota Samarinda relatif rendah dan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Rendahnya TPAK ini menjadi suatu ukuran bahwa penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda masih relatif rendah bahkan cenderung menurun. Kondisi ini terlihat pada tahun 2013 yang mencapai angka 60,81 persen padahal pada tahun sebelumnya mampu mencapai 64,35 persen. Kedepannya pemerintah Kota Samarinda masih perlu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya melalui perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana dasar untuk mendorong iklim investasi. Perhatikan diagram berikut :

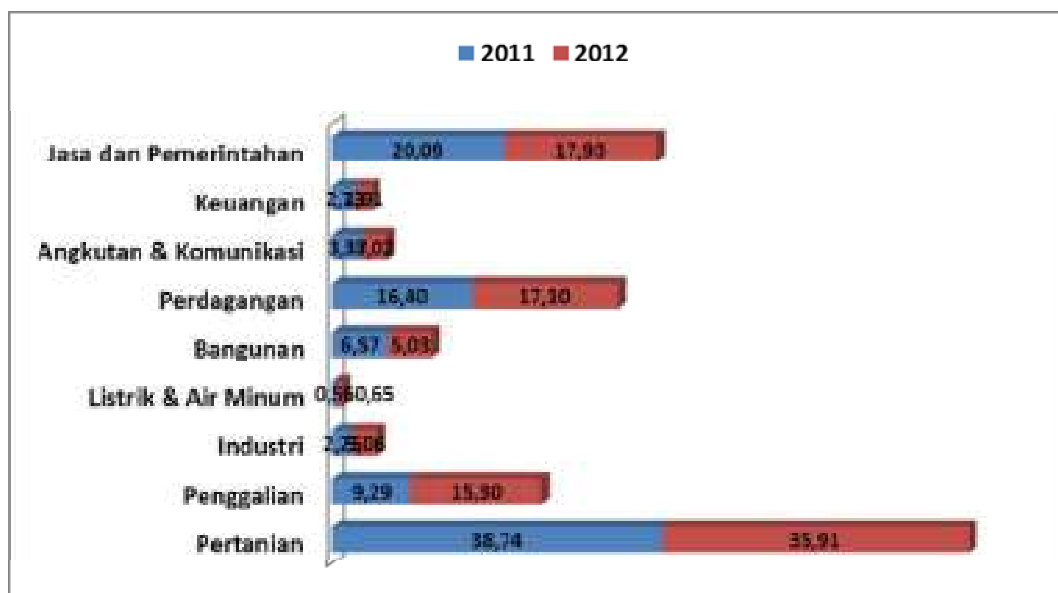


Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Gambar 4.3. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja di Kota Samarinda Tahun 2010 - 2013

Distribusi tenaga kerja menurut lapangan usaha di Kota Bontang tiga tertinggi tahun 2012 yaitu jasa kemasyarakatan sebesar 31,28 persen, perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel konstruksi 24,35 persen dan pertambangan dan penggalian sebesar 12,35 persen.

Sementara di Kabupaten Berau di setiap kelompok umur terjadi komposisi umur yang hampir sama namun mengalami penurunan dikelompok umur 50 tahun ke atas. Hal ini wajar karena pada kelompok umur tua daya tahan tubuh mereka jauh dibawah penduduk usia muda. Pada penduduk 15 tahun keatas, persentase penduduk laki-laki lebih banyak bekerja. Sedangkan persentase penduduk perempuan lebih banyak yang mengurus rumah tangga.



Sumber: BPS Kab. Berau

Gambar 4.4. Penduduk Bekerja Menurut Sektor Pekerjaan Tahun 2011 dan 2012

4.1.1.3. Infrastruktur

Meningkatnya iklim investasi sektor perdagangan dan perhotelan memberikan efek pada meningkatnya arus migrasi di Kota Samarinda yang selanjutnya berdampak pada peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan penduduk inilah yang memberikan imbas pada meningkatnya kebutuhan rumah dan lahan di Kota Samarinda. Berbagai perusahaan jasa properti dan pengembang perumahan telah banyak berdiri seiring semaking meningkatnya permintaan rumah di Kota Samarinda.

Sampai tahun 2013, menurut survey yang dilaksanakan oleh BPS Kota Samarinda sebanyak 53 persen penduduk telah menempati rumah dengan status kepemilikan rumah milik sendiri, 34 persen berstatus kontrak/sewa, sedangkan sisanya bebas sewa milik orang lain, bebas sewa milik orang tua/sanak/saudara, dan rumah dinas. Mayoritas perumahan dan pemukiman di Kota Samarinda telah memenuhi kriteria rumah sehat. Kriteria rumah sehat berdasarkan Kementerian Kesehatan RI adalah memiliki tujuh kriteria, yaitu atap berplafon, dinding permanen, jenis lantai bukan tanah, tersedia jendela, ventilasi cukup, pencahayaan alami, dan tidak padat huni (minimal 8 m² per orang).

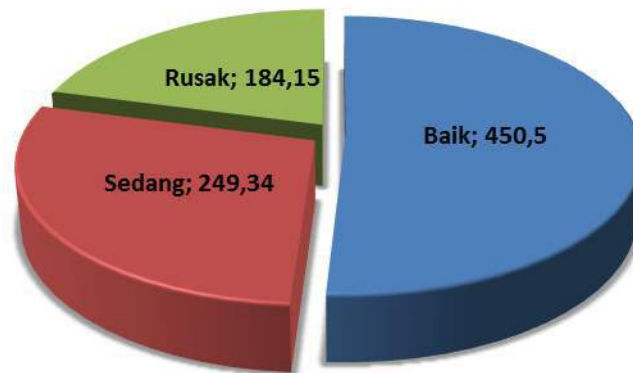
Pada tahun 2013, di Kota Samarinda tidak lagi terdapat rumah tangga yang tinggal di rumah berlantai tanah. Di samping itu sebesar 70,58 persen rumahtangga di Samarinda juga sudah menempati rumah yang luasnya ideal, yaitu rata-rata di atas 32 m² per rumah tangga atau 8 m² perkapita. Sedangkan untuk jenis dinding rumah ter-luas adalah dinding yang terbuat dari kayu (51,41%), dan

untuk atap rumah terluas yang ada di Samarinda sebagian besar adalah jenis atap yang terbuat dari seng (76,24%).

Fasilitas perumahan di Kota Samarinda pada tahun 2013 ini juga semakin baik, mulai dari fasilitas air minum, yaitu hanya 0,93 persen penduduk di Kota Samarinda masih mengkonsumsi air minum yang bersumber dari air sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, air hujan dan air sungai. Sedangkan 99,07 persennya sudah menggunakan fasilitas air bersih. Peningkatan fasilitas ini dikarenakan akses masyarakat menuju air bersih juga semakin banyak. Jika dilihat dari cara memperoleh air minum, 68,22 persen penduduk di Kota Samarinda lebih memilih untuk memperoleh air minum dengan cara pembelian, cara memperoleh air minum seperti ini misalnya dengan membeli air isi ulang, air kemasan, dll. Sedangkan 26,45 persen penduduk Kota Samarinda memperoleh air minum dengan cara lang-ganan secara periodik seperti air dari PDAM, kemudian 5,33 persen sisanya memperoleh air minum tanpa melakukan pembelian atau pembayaran yang di-peroleh dengan usaha sendiri

Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan di tujukan untuk mewujudkan pembangunan kawasan fungsional yang memiliki keterkaitan erat dengan tujuan pembangunan Kota Samarinda menuju kota metropolitan berbasis industri, perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kemudahan hubungan transportasi antar pusat kegiatan ataupun memperlancar hubungan sosial antar masyarakat. Kota Samarinda memiliki Jalan Nasional sepanjang 53,36 km, jalan provinsi sepanjang 114,73 km, dan jalan kota sepanjang 715,90 km. Tahun 2012 melalui Dinas Bina Marga dan Pengairan,

Pemerintah Kota Samarinda melakukan pembangunan jalan sepanjang 2,4 km yang terdiri atas beton dan agregat, dan peningkatan jalan sepanjang 6,5 km berupa beton. Bila dilihat dari kondisi jalan, tahun 2012 sepanjang 450,50 km memiliki kondisi baik, 249,34 km sedang, dan jalan rusak sepanjang 184,15 km. Penyebab kerusakan jalan salah satunya curah hujan yang tinggi di Kota Samarinda, sehingga jalan kota sering mengalami pengikisan oleh air. Secara lengkap perhatikan gambar berikut :



Gambar 4.5. Perkembangan Kondisi Jalan di Kota Samarinda

Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan banjir tidak luput dari perhatian pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Bina Marga dan Pengairan bekerja sama dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota. Pembentukan tim tanggap cepat dan peningkatan drainase di beberapa ruas jalan merupakan salah satu langkah konkrit pemerintah dalam mengatasi banjir yang sampai saat ini mencapai beberapa kecamatan di Kota Samarinda. Konsistensi pemerintah dalam menanggulangi banjir secara perlahan telah menunjukkan hasil. Dengan curah hujan yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2011, pada tahun ini tidak terdapat

adanya genangan besar yang bertahan selama beberapa hari sehingga menyebabkan roda perekonomian terhenti sementara.

Guna menunjang fasilitas perhubungan dan untuk mengurangi beban dari jembatan Mahakam, saat ini sedang dilaksanakan pembangunan Jembatan Mahkota II yang menghubungkan kecamatan Sambutan dengan kecamatan Palaran. Pembangunan jembatan Mahkota II dimaksudkan untuk :

- 1) Mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas pada jembatan Mahakam
- 2) Mengantisipasi kebutuhan prasarana transportasi yang menghubungkan pusat kota dengan daerah-daerah sekitarnya
- 3) Mendukung pertumbuhan wilayah dan pengembangan Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur

Penyelesaian masalah kemacetan di Kota Samarinda tidak berhenti sampai disitu, fly over menjadi salah satu solusi untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Fly Over ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat, mengurangi beban layanan arus lalu lintas pada ruas jalan yang sudah ada, dan mengurangi volume lalu lintas pada jalan. Pemerintah Kota Samarinda saat ini sedang melaksanakan pembangunan Fly Over Air Hitam yang terletak di persimpangan air hitam (Jl.Juanda - Jl.Kadrie Oening - Jl.AW.Syahrani - Jl.Pembangunan). Fly over ini dibangun dengan panjang 621,27 meter dan lebar mencapai 9 meter.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat daya saing daerah. Berikut ini diuraikan fasilitas wilayah/infrastruktur yang ada di Kota Balikpapan. Sarana jalan raya adalah

bagian dari sistem perhubungan utama di Kota Balikpapan. Selain itu ada sarana perhubungan pelabuhan Semayang dan perhubungan udara Internasional Sepinggian. Sebagai sarana utama jalan raya di Kota Balikpapan, panjang jalan di Kota Balikpapan pada tahun 2010 adalah sepanjang 799,52 km dengan rincian sesuai status jalan sebagai berikut: Jalan Nasional : 115,0 Km, Jalan Propinsi: 221,07 Km, dan Jalan Kota : 463,35 Km. Adapun kondisi fisik jalan tersebut sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat bahwa untuk jalan Nasional dalam kondisi baik sepanjang 97,65 km atau 84,91 persen, kondisi sedang sepanjang 15,33 Km atau 13,33 persen dan kondisi rusak 2 km. Untuk jalan Propinsi dalam kondisi baik sepanjang 146,43 km atau 66,23 persen, kondisi sedang sepanjang 51,43 Km atau 23,23 persen dan kondisi rusak 23,3 Km atau 10,49 persen. Sedangkan untuk jalan kota dalam kondisi baik sepanjang 305,42 km atau 65,91 persen, kondisi sedang sepanjang 96,99 Km atau 20,93 persen dan kondisi rusak 60,94 Km atau 13,15 persen.

Sebagai kota yang secara fisik berbatasan dengan laut, maka Kota Balikpapan memiliki beberapa fasilitas pelabuhan baik pelabuhan umum maupun pelabuhan khusus. Pelabuhan umum terdiri dari Pelabuhan Semayang, Pelabuhan Fery Kariangau, Pelabuhan Kampung Baru. Sedangkan pelabuhan khusus terdiri dari Pelabuhan Pertamina, Pelabuhan Pendaratan Ikan Manggar, dan Pelabuhan yang dimiliki oleh perusahaan di Kawasan Industri Kariangau. Keberadaan Pelabuhan Semayang yang berada di pusat kota saat ini menimbulkan bangkitan lalu lintas yang cukup tinggi terlebih lagi adanya peningkatan bongkar muat barang dan penumpang. Oleh karena itu, di masa yang akan datang pelabuhan ini

hanya akan dioperasikan untuk pelabuhan penumpang. Sedangkan pelabuhan bongkar muat barang akan dikembangkan di Kariangau.

Bandar Udara Sepinggian saat ini melayani penerbangan domestik dan internasional. Namun kapasitas bandaranya relatif terbatas dalam menampung penumpang. Oleh karena itu pengembangan bandara baik dari segi *run way* maupun terminal akan mampu meningkatkan pelayanan Bandara Udara Sepinggian.

Kota Bontang merupakan daerah maritim yang penggunaan lautnya kompleks. Untuk mendukung aktivitas pesisir maka Kota Bontang memiliki beberapa pelabuhan laut, yakni : 3 (tiga) pelabuhan khusus, 2 (dua) pelabuhan umum dan 1 (satu) pelabuhan pendaratan ikan. Keberadaan pelabuhan tersebut menjadi salah satu gambaran berkembangnya interaksi wilayah Kota Bontang dengan wilayah luar, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Untuk mendorong tumbuhnya sektor jasa kelautan, pemerintah berupaya segera mengoperasikan pelabuhan umum Loktuan dan memperbaiki jaringan jalan untuk akses keluar masuk Kota Bontang. Ini sebagai upaya untuk mewujudkan Kota Bontang menjadi jalur transportasi penumpang dan barang bagi Kaltim untuk wilayah tengah.

Kawasan ini juga menjadi alur migrasi ikan dan sepanjang pesisirnya terdapat hamparan terumbu karang dan hutan mangrove dengan keanekaragaman hayatinya. Potensi perikanan belum berkembang karena masih dikelola secara tradisional. Dengan demikian perlu diupayakan teknologi budidaya, penangkapan, dan pengolahan hasil perikanan yang modern.

Pesisir Kota Bontang memiliki ekosistem dasar yang lengkap karena terdiri dari hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Sebagian terumbu karangnya masih baik sehingga dapat dikembangkan untuk lokasi diving dan snorkling. Hutan mangrove memiliki jenis yang bervariasi sehingga cocok untuk ekowisata. Kondisi ini menggambarkan bahwa Kota Bontang juga memiliki potensi untuk wisata bahari dan 14 wisata mangrove selain perikanan.

Berdasarkan tata ruang, Bontang Utara dikembangkan untuk kawasan industri berbasis kimia, kawasan pelabuhan umum, pelabuhan pendaratan ikan kawasan wisata, dan kawasan perniagaan. Berkembangnya industri di kawasan ini menyebabkan pertumbuhan penduduk dan pemukimannya paling tinggi. Dengan kondisi ini wajar jika pemerintah memberikan porsi pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya yang lebih besar jika dibanding kecamatan lainnya. Kecamatan Bontang Barat merupakan pintu gerbang masuk ke Kota Bontang. Wilayah ini diarahkan untuk menyangga daerah sekitarnya sehingga di dalamnya dibangun rumah sakit umum, terminal antar kota dan kawasan niaga. Tingkat kepadatannya sedang karena hampir sepertiga dari wilayahnya merupakan hutan lindung. Sebagian besar wilayahnya merupakan pemukiman sehingga pembangunan diarahkan infrastruktur pemukiman berupa jalan dan drainase. Kecamatan Bontang Selatan merupakan memiliki wilayah administrasi yang paling luas dengan kepadatan paling kecil. Wilayah tersebut menjadi kawasan pengembangan di Kota Bontang. Untuk mendorong keseimbangan kepadatan penduduk maka wilayah tersebut diarahkan untuk pengembangan industri dengan menyediakan kawasan industri baru, pelabuhan rakyat, kawasan pusat perkantoran

pemerintah, dan bandara. Agar berkembang lebih cepat, pemerintah juga membangun akses jalan yang menghubungkan pusat kota dengan pusat pemerintahan, bandara, kawasan industri baru dan rencana jalan bebas hambatan yang akan dibangun Pemerintah Provinsi Kaltim.

Pemerintah Kota Bontang dalam hal ini sedang melakukan pembangunan infrastruktur di antaranya:

- 1) Jalan Lingkar. Guna memperlancar transportasi di Kota Bontang di tahun 2014 ini sedang dalam tahap pelelangan tahap 1 pembangunan jalan lingkar dari 3 tahap yang direncanakan dengan perkiraan menelan biaya sebesar 410 Milyar Rupiah
- 2) Bandara. Bandara sedang dalam perencanaan pembangunan bandara Kota Bontang setelah selama ini hanya didukung oleh bandar udara yang dimiliki oleh PT. Badak NGL Infrastruktur yang telah tersedia untuk mendukung industri:
- 3) Pelabuhan. Pelabuhan sebagai salah satu nadi perekonomian telah difungsikan sebagai pelabuhan kapal penumpang dan kapal barang (cargo) sejak tahun 2013.
- 4) PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Gas). Untuk mendukung suplai listrik Pemkot Bontang menambah daya listrik dari PLN dengan menyediakan 4 mesin PLTG dengan daya mencapai 8 MegaWatt.

Infrastruktur di Kabupaten Berau dibangun untuk mendukung dan memperlancar kegiatan ekonomi. Infrastruktur tersedia berupa jalan, terminal (penmpoang dan barang), bandara udara, pelabuhan pasar, PLTU dan PDAM.

Kabupaten Berau sendiri memiliki transportasi jalan yang sudah cukup memadai dan dari tahun ke tahun telah banyak melakukan pembangunan jalan baik jenis permukaan maupun kondisi jalan. Panjang jalan kabupaten pada tahun 2012 sebesar 1.155,68 km sedangkan jalan propinsi 352,64 km sehingga total jalan yang melintasi daerah ini adalah 1.508,32 km. Panjang jalan ini terbagi berdasarkan jenis permukaan dengan berbagai kondisi. Jenis permukaan jalan terdiri dari permukaan aspal, kerikil, tanah serta tidak diperinci. Berdasarkan grafik 9.1 Jalan Kabupaten dengan jenis permukaan aspal sepanjang 215, 5 km, kerikil sepanjang 827,5 km dan tanah sepanjang 79 km, sedangkan jenis permukaan yang tidak terperinci sepanjang 33,68 km. Sementara itu, kondisi jalan terdiri dari kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat.

Jumlah produktivitas kendaraan bermotor yang paling besar adalah sepeda motor dengan jumlah 9.409 unit, sedangkan untuk jenis mobil penumpang dan mobil bus masing-masing berjumlah 357 unit dan 278 unit kendaraan. Untuk jumlah kendaraan mobil bus sebanyak 16 unit kendaraan.

4.1.1.4. Sumberdaya Alam

Perbedaan kondisi geografis wilayah mengakibatkan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki, sehingga berdampak pada perbedaan komoditi unggulan yang diusahakan di setiap wilayah. Lahan persawahan yang semakin menipis, padi sawah masih mampu menghasilkan 7.243 ton gabah, 4.708 ton beras, 2 ton jagung, 4 ton kacang tanah, 973 ton ubi kayu, dan 112 ton ubi jalar. Hal ini membuktikan bahwa ditengah-tengah pengembangan Kota Samarinda yang

semakin banyak mengubah lahan pertanian menjadi lahan perumahan dan pemukiman, pemerintah Kota Samarinda masih mampu mengoptimalkan lahan yang ada untuk menghasilkan tanaman pangan.

Semakin meningkatnya lahan perumahan dan pemukiman tidak hanya memberikan efek pada produksi tanaman pangan, namun juga berpengaruh pada produksi beberapa tanaman hortikultura. Secara keseluruhan produksi buah di Kota Samarinda menunjukkan peningkatan, namun beberapa komoditi memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan yaitu pada buah pepaya, pisang, langsung, salak, rambutan, sukun, dan melinjo. Bervariasinya produksi buah di Kota Samarinda memberikan peluang pada masyarakat untuk membuka industri rumah tangga aneka olahan dari buah-buahan, seperti keripik sukun, keripik salak, hingga roti durian. Pembangunan sektor pertanian di Kota Samarinda difokuskan pada penyediaan bahan pangan utama sebagai wujud program ketahanan pangan. Pada tahun 2013, ketersediaan beras di Kota Samarinda mencapai 71.596 kg ada penurunan dari tahun 2012 yang kala itu mencapai 72 ribu kg.

Hasil komoditi perkebunan rakyat di Kota Samarinda menunjukkan hasil panen yang beragam. Komoditi karet, kelapa dan coklat masih menjadi komoditi yang baik untuk dikembangkan mengingat hasil yang sangat menguntungkan bagi para petani. Komoditi Kelapa sawit yang baru saja dikembangkan di Kota samarinda saat ini menjadi salah satu komoditi yang cukup menggiurkan untuk para petani, karena hasilnya cukup baik. Begitu juga halnya dengan komoditi kopi dan lada masih merupakan komoditi primadona bagi petani di kota Samarinda,

karena nilai jual yang cukup tinggi dan permintaan konsumen yang cukup banyak, sayangnya pembinaan dan revitalisasi untuk komoditi ini kurang diperhatikan, sehingga hasilnya memperlihatkan penurunan. Tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kelapa, lada dan karet pada tahun 2014 merupakan komoditi perkebunan utama atau andalan bagi petani Kota Samarinda. Komoditi tanaman perkebunan kebanyakan dipasarkan dalam bentuk buah, biji dan getah, komoditi buah karet di pasarkan dalam bentuk getah. Komoditi Kelapa, coklat, cengkeh, kelapa hibrida, dan buah aren dipasarkan dalam bentuk buah. Sedangkan Komoditi kopi, lada, kemiri, panili dan pala di pasarkan dalam bentuk biji kering.

Pemerintah Kota Samarinda bersama Pemerintah Provinsi Kaltim sedang menggalakkan penyediaan bahan pangan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal). Dalam mendukung pencapaian program tersebut, pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perikanan dan Peternakan meluncurkan Program Swasembada Daging Sapi yang dikenal dengan nama PROSWA DASI.

Program Swasembada Daging Sapi di Kota Samarinda merupakan sebuah upaya dalam mendukung tercapainya Program Swasembada Daging Sapi Nasional pada Tahun 2014. Tingkat kebutuhan daging Sapi di Kota Samarinda setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang signifikan hal ini dikarenakan peran Kota Samarinda sebagai kota jasa yang mensuplai kebutuhan daging Sapi untuk masyarakat Kota Samarinda serta menjadi pemasok kebutuhan daging Sapi untuk kabupaten/ kota di sekitarnya (Kutai Kartanegara, Bontang, dll). Selain itu dalam mendukung terciptanya salah satu visi Kota Samarinda yaitu sebagai kota industri maka sarana dan prasana fasilitas Rumah Pemotongan Hewan semakin

ditingkatkan sebagai upaya dalam menyediakan bahan pangan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Pelayanan inseminasi buatan menjadi salah satu sentral kegiatan dalam upaya mencapai swasembada daging sapi di Kota Samarinda, karena peningkatan Populasi Ternak Sapi Potong harus didukung dengan usaha perbibitan ternak yang terencana. Inseminasi buatan pun dapat meningkatkan produktivitas ternak lokal melalui perbaikan genetik yang dihasilkan dari perkawinan silang dengan sifat genetik ternak unggul. Bila melihat di tengah-tengah masyarakat, ternak yang menjadi pilihan masyarakat adalah ayam ras pedaging. Hal ini terlihat dari jumlah populasinya yang mencapai 9 juta ekor pada tahun 2013. Meningkat hampir 50% dari tahun 2010 yang kala itu berkisar 6 juta ekor. Selain perkembangan pada populasi ternak, pengembangan diarahkan pada produksi daging dan telur dalam upaya mencapai swasembada di Kota Samarinda. Pada tahun 2014, telur yang dihasilkan mencapai 155.607 ton dan daging sebesar 4.183,2 ton.

Dalam mendukung pertumbuhan PDRB, sub sektor perikanan dan peternakan menunjukkan gairah yang positif dibanding pertanian dan perkebunan maupun kehutanan. Hal ini didukung dengan tingginya permintaan terhadap hasil perikanan dan peternakan sebagai sumber makanan. Luas areal Kolam ikan air tawar terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, luas kolam ikan air tawar mencapai 85,4 hektar, ada peningkatan luasan kolam di kecamatan Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sambutan, dan Loa Janan Ilir. Namun peningkatan luas kolam tidak diiringi dengan peningkatan produksi. Pada tahun 2013, produksi ikan sebesar 467,1 ton, terjadi peningkatan 57 ton dari tahun 2012

yang kala itu mencapai 409,5 ton. Produksi tertinggi berada di Kecamatan Palaran, hal ini sejalan dengan banyaknya jumlah rumah tangga perikanan budidaya kolam yang mencapai 118 buah di daerah tersebut dari total 325 rumah tangga yang ada di Kota Samarinda. Tidak hanya dikolam air tawar, budidaya juga dilakukan di dalam keramba, jenis budidaya ini juga digemari oleh para petani, karena mengandalkan media air sungai mahakam dan perairan umum lainnya, hanya saja jenis ikan dibudidayakan terbatas pada jenis ikan-ikan tertentu saja yang tidak memerlukan penanganan yang terlalu intensif, seperti ikan mas, ikan nila dan ikan patin.

Berbeda dengan perkebunan dan pertanian, sektor kehutanan saat ini focus pada pengembangan hutan kota sebagai pendukung terwujudnya Kaltim Green yang dicanangkan pemerintah Provinsi Kaltim serta Samarinda Hijau, Bersih, Sehat oleh pemerintah Kota Samarinda. Arah pengembangan ini sebagai bentuk konsistensi pemerintah Kota Samarinda menjaga keseimbangan lingkungan ditengah-tengah semakin berkurangnya daya dukung lingkungan berupa RTH sebagai dampak dari peningkatan infrastruktur, eksplorasi pertambangan, pertumbuhan sektor informal, dan peningkatan investasi.

Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda masih menjadi primadona hingga saat ini. Pada tahun 2013, produksi batubara mencapai 9,8 mT meningkat 3 kali lipat dari tahun 2009 yang saat itu masih berkisar 3 mT. Sedangkan sampai bulan September 2014 produksi batubara di Kota Samarinda sudah mencapai 5,5 mT. Di prediksi peningkatan ini masih terus berlangsung hingga akhir tahun 2014. Menurunnya sektor pertambangan tidak

hanya terjadi pada batubara. Pertambangan minyak bumi dan gas bumi pun menunjukkan tren yang serupa. Pada tahun 2012 realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi mampu mencapai 177,25 ribu barel dan 2700 ribu MMBTU. Namun sampai triwulan III tahun 2014, realisasi lifting hanya mencapai 68,53 ribu barel, sedangkan gas bumi hanya mencapai 1.333 ribu MMBTU.

Kota Balikpapan memiliki komoditi unggulan yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah, baik sektor pertanian maupun dari sektor Industri pengolahan yang memanfaatkan bahan baku hasil pertanian.

Di antara komoditi-komoditi unggulan yang dimiliki masing-masing wilayah di Kota Balikpapan, terdapat beberapa komoditi yang menjadi unggulan tidak hanya di tingkat Kota Balikpapan tetapi sampai ke tingkat Provinsi dan Nasional. Komoditi-komoditi tersebut diantaranya dapat dikategorikan sebagai komoditi khas Kota Balikpapan. Khususnya komoditi unggulan tersebut dapat dilihat dari jenis komoditinya yang hanya dihasilkan atau sebagian besar produksinya terpusat di Kota Balikpapan, dan juga dapat dilihat dari cita rasa yang dimiliki berbeda dengan komoditi yang sama yang dihasilkan daerah lain.

Komoditi-komoditi khas yang menjadi unggulan di Kota Balikpapan diantaranya dari sektor pertanian yaitu pepaya mini, karet, salak, nenas. Sementara dari sektor Industri diantaranya industri kerajinan manik-manik dan batu permata, industri rumput laut.

Pada sektor Perikanan wilayah pesisir laut Kota Balikpapan masih menyimpan potensi sumberdaya yang terbarui (*renewable resources*) khususnya potensi sumber daya perikanan yang belum dimanfaatkan secara

optimal. Selain itu kawasan pesisir dan laut juga memiliki berbagai fungsi ekonomi, antara lain dipergunakan untuk aktivitas pemanfaatan sumberdaya perikanan, pertambangan, pertanian, rekreasi dan pariwisata, kawasan industri, permukiman serta pelabuhan / transportasi. Agar pemanfaatan sumberdaya tersebut dapat optimal diperlukan upaya terpadu untuk pengelolaannya dengan melibatkan peran serta seluruh stakeholder dibidang perikanan dan kelautan. Kota Balikpapan yang memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar bisa memainkan peran strategis dalam menopang dan membangun pondasi ekonomi kota yang kuat. Pada umumnya masyarakat nelayan Kota Balikpapan masih mengandalkan kegiatan perikanan tangkap sampai sekarang, sedangkan kapasitas ruang dan volume ikan semakin berkurang. Hal ini disebabkan kualitas perairan semakin menurun, kerusakan ekosistem yang terus meningkat. Akibatnya ketersediaan nutrien alam di perairan mengalami keterbatasan sehingga sumberdaya laut berupa ikan, kerang-kerangan, udang dan lain-lain tidak mampu bertahan sampai dapat dikonsumsi. Salah satu komitmen yang perlu digalakkan oleh Kota Balikpapan untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan meningkatnya income masyarakat nelayan Balikpapan adalah dengan mengalihkan kegiatan penangkapan selama ini ditekuni ke bentuk usaha budidaya berbagai jenis biota laut yang cocok untuk dikembangkan. Pengembangan sektor perikanan budidaya di Kota Balikpapan memiliki proses yang baik dilihat dan ketersediaan lahan dan potensi pemasarannya. Wilayah perairan yang memiliki potensi untuk pengembangan budidaya perikanan adalah perairan Kariangau sampai Manggar, Teritip dan Lamaru. Jenis Budidaya ikan selama ini dilakukan

dalam tambak dan karamba jaring apung. Di sisi lain pada kawasan pesisir dan lautan Kota Balikpapan sangat potensial untuk dikembangkan budidaya ikan yang mempunyai nilai ekonomis penting selain udang dan bandeng adalah ikan kerapu (kerapu tiks, kerapu macan, kerapu sunu, dan kerapu lumpur) maupun rumput laut dan jenis kerang-kerangan.

Pada Sektor Industri, pengembangan kota diarahkan kepada sektor-sektor ekonomi yang potensial dan mempunyai unggulan, termasuk industri kecil/ rumah tangga yang pada saat ini tersebar di beberapa wilayah Kota Balikpapan. Pengembangan IK/IRT pada saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia, merupakan refleksi dari pemberdayaan ekonomi kerakyatan, namun demikian keberadaannya di pusat perkotaan akan menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan hidup akibat pengolahan hasil produksi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Pemerintah Kota Balikpapan sejak tahun 1994 melalui Program Jangka Menengah menyusun rencana Relokasi Industri kecil/rumah tangga yang pada tahap I diprioritaskan pada pengrajin tahu/tempe Balikpapan. Pada tahun 1995 telah mulai dilakukan pembangunan berbagai fasilitas KIKS tetapi pada tahun 1997 mengalami penundaan akibat pengaruh krisis moneter. Kemudian sejak tahun 2000 dilakukan lagi pembangunan sarana/prasarana yang pada tahap awal Perumnas ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan rumah produksi dan rumah tinggal yang telah selesai sebanyak 50 unit. Proyek Relokasi Industri ini berlaku di Sember km. 3,5 kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas lahan 9 hektar yang mempunyai daya tampung 150 – 200 pengusaha industri kecil, lokasi proyek telah sesuai dengan

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Balikpapan tahun 1994-2004 (pada saat lokasi KIKS ditetapkan).

Dalam pengembangan sektor Pariwisata Kota Balikpapan mempunyai cukup banyak potensi dan sebagian besar merupakan wisata alam dan Peninggalan Sejarah.

Wilayah Kota Bontang 70,30 persen didominasi oleh lautan. Kondisi ini mengakibatkan terbatasnya lahan potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Sebaliknya sektor perikanan dan kelautan diupayakan untuk menjadi sektor unggulan bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bontang pasca migas. Keterbatasan lahan pertanian dimanfaatkan masyarakat untuk pertanian tanaman pangan, padi, umbi-umbian serta sayur-sayuran. Luas areal produksi (panen) padi pada tahun 2014 seluas 37 hektar dengan jumlah produksi gabah sebanyak 153 ton dan produksi beras sebanyak 60 ton. Sedangkan jumlah konsumsi beras sebesar 19.525 ton. Untuk memenuhi kebutuhan beras didatangkan dari daerah lain.

Potensi lain yang dikembangkan yaitu peternakan. Populasi hewan ternak yang dominan di Kota Bontang yaitu babi dengan jumlah populasi babi pada tahun 2014 sebanyak 3.510 ekor. Populasi unggas yang terbanyak adalah ayam buras dengan jumlah populasi sebanyak 81.375 ekor. Selain itu unggas yang ada di Kota Bontang antara lain ayam pedaging, itik, itik manila, burung dara, angsa dan burung puyuh.

Terbatasnya lahan potensial pertanian menjadikan sektor perikanan diharapkan menjadi sektor unggulan bagi pertumbuhan ekonomi Kota

Bontang. Sektor Perikanan dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu perikanan air laut dan perikanan darat. Perikanan laut yaitu semua jenis perikanan yang diambil dari laut, seperti ikan, udang, kepiting dan kerang-kerangan. Perikanan darat dibedakan menjadi perikanan umum, tambak, kolam, dan keramba. Jumlah tangkapan perikanan laut pada tahun 2014 sebesar 4.784 ton. Kapal yang dipergunakan untuk penangkapan ikan berupa perahu tanpa motor, perahu motor tempel dan kapal motor. Data mengenai kapal penangkapan ikan yaitu: Sarana pendukung yaitu tempat pelelangan ikan (TPI) dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) terletak di Tanjung Limau. Hasil laut dari Kota Bontang antara lain ikan kerapu sebanyak 35,6 ton, teripang 25,2 ton dan kakap merah 115,5 ton. Hasil perikanan laut ini rata-rata masih digunakan untuk konsumsi sendiri. Untuk perikanan darat dihasilkan dari tambak, kolam air deras, kolam air tenang, keramba/siring, dan jaring apung. Hasil produksi perikanan darat setiap tahun mengalami peningkatan. Selain sebagai daerah penghasil ikan Bontang merupakan tempat pemasaran hasil tangkapan para nelayan dari luar daerah sehingga di Bontang berdiri sejumlah usaha pengolahan, di antaranya pengolahan kepiting rajungan, pembuatan terasi, rumput laut, dan pengeringan ikan laut. Sekarang berbagai produk yang berbahan dasar ikan terus dikembangkan antara lain pengolahan ikan menjadi amplang, ikan asap, dendeng, abon dan krupuk. Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kota Bontang pemerintah Kota Bontang membentuk sebuah Perusda yaitu PT. Bontang Migas dan Energi (BME). Perusda ini mengelola jaringan gas menjadi listrik untuk menjadi tambahan pasokan listrik di PT. PLN. Untuk memenuhi kebutuhan bahan

bakar masyarakat di Kota Bontang terdapat sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta sarana penyaluran bahan bakar lainnya. Jumlah SPBU di Kota Bontang sebanyak 3 buah, 1 buah depo minyak tanah dan 2 agen LPG.

Pertanian merupakan mata pencaharian dari sebagian besar masyarakat Kabupaten Berau. Sebagai daerah dengan luas wilayah yang besar dan bentuk serta ketinggian lahan yang khas maka pertanian dapat berkembang dengan baik di daerah ini. Luas panen dan produksi padi sawah di Kabupaten Berau pada tahun 2009 mengalami Penurunan luas panen sehingga berimbas pada penurunan produksi dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 2008. Penurunan disebabkan oleh cuaca yang tak menentu (atau cuaca yang sangat ekstrim pada akhir akhir ini). Namun dilihat dari produktivitas perhektarnya tak mengalami penurunan yang berarti. Kecamatan yang memiliki luas panen dan produksi padi sawah terbesar adalah Kecamatan Sambaliung seluas 1.303 hektar. Sedangkan untuk padi ladang, kecamatan yang memiliki luas terbesar adalah Kecamatan Biatan seluas 1.211 hektar. Produksi padi sawah tertinggi adalah 4.364 ton di Kecamatan Gunung Tabur dan 2.884 ton untuk padi ladang di Kecamatan Kelay. Tanaman palawija di Kabupaten Berau antara lain jagung, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, ubi jalar, dan ubi kayu. Selama periode 2005-2009 tanamantanaman tersebut mengalami fluktuasi baik luas panen maupun produksinya. Luas panen palawija terdiri dari berbagai jenis. Pada grafik dibawah terlihat luas panen jagung juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2004 luas lahan adalah 384 ha maka pada tahun 2006 naik menjadi 424 ha, namun kembali

menurun pada tahun 2008 menjadi 206 hektar. Hal yang sama juga terjadi pada produksi jagung. Dari tahun 2004 sebesar 711 ton terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2005 sebesar 718 ton. Pada tahun 2006 menurun menjadi 611 ton. Di tahun 2008 kembali menurun menjadi sebesar 475 ton. Jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Berau antara lain: kelapa, karet, kopi, lada, cengkeh, coklat, kelapa sawit dan lainnya yang merupakan gabungan dari beberapa tanaman perkebunan. Pada tahun 2008 hampir sebagian besar tanaman perkebunan mengalami penurunan yang cukup signifikan, baik dari segi luas tanam maupun produksinya. Tanaman kakao cukup banyak dikembangkan di daerah ini, dimana luasnya 3.250,6 ha dan produksinya mencapai 1.593,8 ton. Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2004 baik luas tanam dan produksi kakao di Kabupaten Berau mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2009 mengalami penurunan. Luas tanaman perkebunan kelapa tahun 2009 sebesar 2.526,6 hektar dengan produksi mencapai 2.791,5 ton. Perkebunan karet dengan luas 1.115,8 ha, namun jenis tanaman perkebunan ini baru enam tahun berproduksi. Pada tahun 2008 produksinya 65,01 ton. Tanaman kopi dengan luas tanam 553,8 ha dengan produksi 147,38 ton selama tahun 2009. Tanaman perkebunan lainnya yaitu cengkeh dengan luas 2 ha dan produksi 0,2 ton. Porsi terbesar baik untuk luas tanaman maupun produksi ditunjukkan oleh tanaman kakao.

Luas Kawasan Hutan Kabupaten Berau berdasarkan SK Menhut No.79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur seluas 2.194.299,525 Hektar, terdiri dari Hutan Produksi

(624.949.726 Ha), Hutan Produksi Terbatas (653.535,418 Ha), Hutan Lindung (402.097,488 Ha) dan Areal Penggunaan Lain (513.716,893 ha). Menurut Lampiran SK Menhut No.79/KPTs-II/2001, Kawasan hutan di Kabupaten Berau seluas 700.282 Ha terbagi dalam wilayah Taman Wisata Alam 17 Ha, Hutan Lindung 351.687 Ha, Hutan Produksi terbatas seluas 351.687 dan Hutan Produksi seluas 557.595.

Pada sektor peternakan, sampai akhir tahun 2009, populasi ternak besar yang terbesar jumlahnya di Kabupaten Berau adalah sapi yaitu 9.170 ekor. Sedangkan jenis ternak lainnya seperti kerbau, kambing, kuda dan babi jumlahnya tidak begitu banyak. Banyaknya ternak yang masuk ke Kabupaten Berau sebesar 2.940 ekor yang terdiri dari sapi dan kambing, sedangkan ternak yang dipotong berjumlah 88 ekor dari 3 jenis ternak yaitu sapi, kambing, dan babi. Pemotongan hewan ternak untuk konsumsi bisa dilakukan di rumah potong hewan dan di luar rumah potong hewan. Untuk jenis unggas, pada akhir tahun 2009 menunjukkan populasi sebesar 950.953 ekor dari tiga jenis unggas yang dibudidayakan yaitu ayam ras (pedaging dan petelur), ayam buras, dan itik. Jenis unggas terbanyak adalah ayam ras pedaging sebesar 682.788 ekor, ayam buras 251.992 ekor, itik 10.973 ekor, dan ayam ras petelur sebanyak 15.250 ekor. Produksi daging sapi pada tahun 2009 sebanyak 130,720 ton meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 165,625 ton. Produksi daging kambing juga mengalami peningkatann dari tahun lalu yaitu menjadi 9,89 ton. Untuk produksi daging ayam kampung tidak mengalami perubahan 101,92 ton pada 2009.

Perikanan merupakan salah satu produk unggulan dari Kabupaten Berau. Beberapa kecamatan yang memiliki daerah perairan menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian. Perikanan dibagi menjadi dua perikanan laut dan darat. Produksi perikanan laut terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada grafik di bawah dapat dilihat bahwa meskipun sempat anjlok pada tahun 2003 produksi perikanan terus meningkat pada tahun berikutnya. Produksi perikanan tersebut berkisar antara 12.000 sampai dengan 14.000 ton per tahun.

Potensi sumberdaya alam dan sumber daya mineral yang cukup besar di Kabupaten Berau, dilihat dari segi geologi dan potensi bahan galian mempunyai daya tarik yang cukup tinggi di mata para investor bidang pertambangan, namun masih banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terkait erat dengan masih perlunya secara terus menerus informasi geologi dan sumberdaya mineral dalam rangka mengelola sumberdaya mineral, energi, air tanah, pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana alam, penggunaan lahan dan penataan ruang wilayah pertambangan. Hasil pertambangan di Kabupaten Berau mencakup pertambangan non migas, khususnya produksi batubara pada tahun 2005 - 2009 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Disamping produksi dari perusahaan yang Izinnya dari pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Berau juga menerbitkan Izin Kuasa Pertambangan, jumlah izin yang telah di terbitkan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Berau per 31 Desember 2008 ada sejumlah 113 izin pada sejumlah 68 perusahaan. Dari jumlah tersebut yang masih aktif beroperasi per 31 Desember 2008, terdapat 56 Kuasa Pertambangan.

Pada sektor Pariwisata Kabupaten Berau telah ditetapkan sebagai salah satu Destinasi Unggulan Propinsi Kalimantan Timur dan Indonesia, karena potensi kekayaan dan keindahan alam serta ragam budaya di Kabupaten Berau, Keindahan Bawah laut di Pulau Derawan, Sagalaki, Kakaban dan Maratua telah diakui secara nasional maupun internasional yang memiliki keunikan sejajar dengan keindahan bawah laut Kepulauan Raja Empat (Irian) dan Wakatobi (Sulawesi Tenggara). Paradigma pembangunan pariwisata melalui usaha kepariwisataan dapat mendorong kegiatan ekonomi sehingga Dinas kebudayaan dan Pariwisata yang semula termasuk dalam kegiatan bidang sosial, sekarang telah dirasakan peranannya dalam mendorong sektor ekonomi sehingga saat ini termasuk dalam bidang ekonomi, peranan tersebut telah dibuktikan dengan penerimaan PAD Kabupaten Berau dimana sektor pariwisata memberikan kontribusi urutan ke tiga setelah pertambangan dan pertanian perkebunan. Sampai dengan akhir bulan Nopember jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (wisman) ke Kabupaten Berau mencapai 1.583 orang, sedangkan Wisatawan Nusantara mencapai 227.807 orang, jumlah tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan apabila dibandingkan data kunjungan wisatawan tahun 2008 yang mencapai 591 (wisman) dan 40.949 (wisnu)

5.1.2. Potret Investasi Daerah

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda memasuki tahun 2011 memperlihatkan iklim yang sangat positif. Hal ini terlihat dari pertumbuhan pendapatan domestik (PDRB) dari Rp. 11,7 trilyun menjadi Rp. 13,5 trilyun atau tumbuh sebesar 15,26

persen. Pertumbuhan ekonomi sebesar 15,26 persen. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan pada pendapatan domestik dari Rp. 14 trilyun menjadi Rp. 14,8 trilyun atau tumbuh sebesar 5,59 persen. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,59 persen tersebut merupakan suatu hasil dari peningkatan kontribusi pada sektor pelayanan (*service*) yang setiap tahun semakin tinggi hingga mencapai 67,07 persen pada tahun 2013. Pada Tahun 2007-2010 kontribusi ekonomi Kota Balikpapan di Kalimantan Timur mencapai 5 – 6 persen ini dilihat dari kontribusi PDRB Kota Balikpapan terhadap total PDRB Kalimantan Timur. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan juga tergolong tinggi, atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur dan bahkan nasional. Pada tahun 2006 tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 4,62 persen dan pada tahun 2008 mencapai 12,37 persen. Kota Bontang mengalami laju pertumbuhan ekonomi dengan migas tahun 2010 mengalami perlambatan sebesar 3,67 persen. Dalam lima tahun terakhir mengalami perlambatan rata-rata 2,64 persen per tahun. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas selama lima tahun rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 5,55 persen per tahun. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Berau pada tahun 2009 mencapai 5,96 persen; meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 8,05 persen (2010). Namun, pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 7,93 persen. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Berau kembali membaik pada tahun 2012, yaitu menjadi 7,99 persen. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi kabupaten Berau sebesar 7,40 persen.

Sektor industri merupakan salah satu dari 3 sektor yang mendominasi pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda selain sektor pertambangan dan sektor

perdagangan/hotel/restoran. Pertumbuhan sektor industri di Kota Samarinda di dominasi oleh Industri Kecil Menengah (IKM) yang lebih banyak berperan dalam memproduksi barang jadi, mengingat keterbatasan daerah dalam penyediaan bahan baku. Tercatat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda, sampai tahun 2014 industri kecil yang beroperasi mencapai 1.078 unit dan industri menengah mencapai 144 unit. Kedua industri tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 10.759 orang dengan nilai investasi mencapai Rp. 300 milyar. Perindustrian di Kota Samarinda juga di kembangkan dan diarahkan untuk menghadapi persaingan dalam ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2015. Perhatikan tabel berikut :

Tabel 4.3. Pertumbuhan IKM Di Kota Samarinda Tahun 2012-2014

No	Uraian	Tahun		
		2012	2013	2014
1.	Unit Usaha (buah)	1.175	1.222	1.222
2.	Tenaga Kerja (orang)	10.168	10.759	10.759
3.	Investasi (Milyar Rupiah)	236	300	300

Sumber : Data diolah

Industri kecil di Kota Samarinda didominasi oleh industri logam/logam mulia yang mencapai 358 unit pada tahun 2014, kemudian 202 unit pada industri kayu dan penerbitan/percetakan/reproduksi media rekaman. Industri logam yang paling berkembang di Kota Samarinda adalah bengkel (reparasi kendaraan bermotor roda empat dan roda dua) yang berjumlah 220 unit, sedangkan industri penerbitan didominasi oleh percetakan dan foto kopi. Selain mengembangkan perindustrian, pemerintah Kota Samarinda juga fokus pada pengembangan koperasi. Pembangunan koperasi mengalami kemajuan yang cukup

mengembirakan jika diukur dengan jumlah koperasi, jumlah anggota, aktiva dan volume usaha. Pada masa sekarang secara umum koperasi mengalami perkembangan usaha dan kelembagaan yang mengairahkan. Namun demikian, koperasi masih memiliki berbagai kendala untuk pengembangannya sebagai badan usaha. Hal ini perlu memperoleh perhatian dalam pembangunan usaha koperasi pada masa mendatang. Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang. Berangkat dari kondisi di atas dan diiringi dengan keseriusan pemerintah Kota Samarinda, Kota Samarinda memperoleh penghargaan sebagai Kota Penggerak Koperasi pada tahun 2014. Menurut catatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda, penghargaan ini diperoleh sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap capaian Kota Samarinda yang mampu mewujudkan 84 persen koperasi aktif dari total 1.180 koperasi. Berikut ini data koperasi di Kota Samarinda tahun 2014:

Tabel 4.4. Perkembangan Koperasi Aktif Di Kota Samarinda (Unit) Tahun 2012-2014

Uraian	2012	2013	2014
Koperasi Aktif	1.062	986	991
Koperasi Tidak Aktif	175	189	189
Total	1.237	1.175	1.180
Persentase Aktif	85,9%	83,9%	83,9%

Sumber : Dinas Koperasi & UKM Kota Samarinda

Dalam mendukung peningkatan investasi di Kota Samarinda, pemerintah Kota Samarinda telah memperkuat kelembagaan perizinan satu pintu melalui pembentukan Badan Pelayanan PerIzinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) Kota Samarinda yang tertuang dalam Perda Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008. Pada tahun 2013 BP2TSP Kota Samarinda telah mengeluarkan IMB sebanyak 2.514 buah, Izin prinsip sebanyak 3 buah, Izin usaha sebanyak 9.490 buah, dan Izin lokasi sebanyak 29 buah dari total 43 pemohon.

Iklim investasi di Kota Samarinda telah banyak mengalami perkembangan. Kondisi ini dapat terlihat secara nyata dari pembangunan pusat perdagangan Big Mall yang akan beroperasi pada awal 2015, pembangunan Hotel Ibis dan Mercure, dan beroperasinya Hotel Horison dan Amaris. Perhatikan peningkatan investasi di Kota Samarinda sebagai berikut :

Tabel 4.5. PMA dan PMDN Di Kota Samarinda Tahun 2004-2012

TAHUN	PMA (dalam jutaan)	PERUSAHAAN PMA	PMDN (dalam jutaan)	PERUSAHAAN PMDN
2004	642.248	8	1.006.067	13
2005	535.207	13	941.120	6
2006	640.237	6	1.336.789	8
2007	485.000	7	1.610.590	5
2008	1.185.000	15	762.720	7
2009	84.700	7	2.092.000	12
2010	140.000	1	1.230.000	12
2011	1.249.372	8	1.981.794	19
2012	1.454.400	4	1.782.800	7
2013	1.874.000	5	2.565.500	70
2014	1.524.000	4	2.336.000	63

Sumber : Badan Penanaman Modal Daerah Kota Samarinda

Proyek PMDN yang paling berkembang di Kota Samarinda adalah pada sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan yang mencapai Rp. 870 milyar. Sedangkan proyek PMA yang paling berkembang adalah sektor pertambangan dan penggalian yang mencapai Rp. 1,3 trilyun. Peningkatan investasi ini diharapkan mampu memberikan efek yang sangat besar terhadap perekonomian Kota Samarinda melalui penyerapan tenaga kerja yang selanjutnya akan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Dari peningkatan daya beli inilah diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tercapai, sehingga angka kemiskinan dapat menurun. Untuk menunjang dan mendukung laju pertumbuhan perekonomian di Kota Samarinda, terdapat 4 bank milik pemerintah, 26 bank milik swasta nasional, 2 bank milik swasta asing, dan 2 bank milik pemerintah daerah.

Tabel 4.6. Realisasi Investasi di Kota Samarinda Tahun 2004 – 2014

Tahun	Investasi					
	PMDN		PMA		Jumlah	
	Jml (unit)	Nilai (Rp. juta)	Jml (unit)	Nilai (Rp. juta)	Jml (unit)	Nilai (Rp. juta)
2004	13	1.006.067	8	642.246	21	1.648.313
2005	6	941.120	13	535.207	19	1.476.327
2006	8	1.336.789	6	640.237	14	1.977.026
2007	5	1.610.590	7	485.000	12	2.095.590
2008	7	762.720	15	1.185.000	22	1.947.720
2009	12	2.092.000	7	84.700	19	2.176.700
2010	12	1.230.000	1	140.000	13	1.370.000
2011	19	1.981.794	8	1.249.372	27	3.231.166
2012	7	1.680.100	4	1.424.400	11	3.104.500
2013	70	2.565.500	5	1.874.000	75	4.439.500
2014	152	3.835.000	7	1.598.294	159	5.433.294

Sumber: BPMD Kota Samarinda

Di Kota Balikpapan investasi baik asing, domestik maupun pemerintah, memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan investasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu iklim investasi yang kondusif, kemudahan dan kejelasan prosedur serta kondisi makro ekonomi daerah tersebut. Jika dilihat dari perbandingan angka realisasi investasi di Kota Balikpapan selama kurun waktu empat tahun terakhir (sejak April 2007 hingga 2010) untuk nilai investasi swasta nasional, PMA-PMDN dan pemerintah kota, maka nilainya berfluktuatif. Jika di tahun 2007 total investasi mencapai Rp 2,7 triliun dengan serapan tenaga kerja 2.850 orang dan luas lahan 557,8389, maka di tahun 2008 total investasinya tembus di angka Rp 7,21 triliun dengan serapan tenaga kerja 3.892 orang dan luasan lahan 1.822,0193. Sementara di tahun 2009, total investasi mencapai Rp 6,35 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 6.038 orang dan luasan lahan 719.0435. Sedangkan sepanjang tahun

2010, total investasi sebesar Rp 4,7 triliun dengan serapan tenaga kerja 1.995 orang dan luasan lahan 157,089 hektar. Khusus untuk realisasi investasi di tahun 2010 mencapai Rp. 5,38 triliun, jika dirincikan, maka nilai investasi terbesar masih diduduki investasi dari swasta nasional yang mencapai Rp 3,31 triliun. Lalu, disusul investasi pemerintah kota senilai Rp 1,64 triliun dan investasi PMA-PMDN senilai Rp 430 miliar. Kota Balikpapan yang tidak memiliki sumber daya alam memadai, sehingga perkembangan dan pembangunan kota sangat tergantung pada masuknya investasi dan kunjungan wisata dari daerah lain. Pada tahun 2010, sektor pariwisata mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah tamu yang menginap di hotel-hotel di Balikpapan masing-masing untuk tamu warga Negara Indonesia (WNI) meningkat 232 persen dan tamu warga negara asing meningkat 257 persen.

Pemerintah Kota Bontang saat ini senantiasa berkomitmen membuka peluang investasi dalam sektor kelautan perikanan dan pariwisata, untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini merupakan dukungan kebijakan pemerintah guna menciptakan investasi yang kondusif agar dapat menarik para investor. Sektor kelautan dan perikanan diharapkan menjadi sektor unggulan bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bontang. Pada tahun 2010 untuk perikanan laut tercatat jumlah tangkapan sebesar 7.656,3 ton dengan jumlah kapal penangkap ikan sebanyak 1.240 unit dan jumlah rumah tangga perikanan sebanyak 2.660 kepala keluarga serta dilengkapi dengan 1 unit tempat pelelangan ikan. Sementara itu untuk perikanan darat terdapat tambak seluas 153,3 ha dengan jumlah produksi 8,2 ton, kolam seluas 28 hektar dengan jumlah produksi 5,6 ton,

serta karamba sebanyak 48 unit yang terletak pada lahan seluas 7,8 hektar dengan jumlah produksi 3,9 ton. Untuk mengembangkan sektor perikanan tahun 2010 dibuat 5 unit rumah pembenihan ikan. Peluang investasi sektor perikanan dan kelautan yang dapat dikembangkan yaitu : penangkapan dan pengolahan ikan dikawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), Pengembangan Budidaya rumput laut, pembangunan cold storage dan lainnya. Kawasan yang akan dikembangkan sebagai sektor kelautan dan perikanan yaitu kecamatan Bontang Selatan dengan produksi ikan pada tahun 2013 sebesar 7.499 ton dan Kecamatan Bontang Utara dengan produksi ikan sebesar 6.566 ton. potensi yang akan diarahkan pada sektor kelautan dan perikanan adalah budidaya udang 262,1 hektar dengan pemanfaatan 131,05 hektar, budidaya bandeng 262,1 hektar dengan pemanfaatan 63,63 hektar, budidaya rumput laut 676 hektar dengan pemanfaatan 331 hektar dan budidaya ikan laut 833 hektar. Dengan hasil produksi di kawasan tersebut salah satunya adalah pengolahan ikan kering, pengolahan amplang, rumput laut serta pengolahan ikan asin. Pengembangan hasil produksi tersebut didukung oleh jumlah penangkapan ikan yang melimpah saat musim panen dan masih tersedianya lahan untuk pengembangan rumput laut. Namun demikian, dalam aspek pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan, masih terdapat kendala pada kapal dan alat tangkap nelayan serta pemanfaatan lahan budidaya rumput laut belum dilakukan secara optimal. Potensi pengembangan perikanan kelautan masih diperlukan peningkatan kapasitas dan modal kerja sehingga kualitas ikan olahan menjadi lebih baik dan layak untuk ekspor. Sehingga dalam RUPM Kota Bontang, pemerintah menetapkan pemberian insentif berdasarkan criteria bidang

usaha. Salah satunya yang berada didaerah terpencil, didaerah tertinggal, daerah perbatasan atau daerah yang dianggap perlu pemberian insentif. Sementara itu, kawasan ini juga berpotensi dijadikan kawasan wisata bahari karena memiliki teluk yang melindungi dan secara geografis sangat strategis. Hal ini dibuktikan dengan keragaman objek wisata yang dimiliki Kota Taman, seperti wisata alam dan wisata budaya. Objek wisata alam yang menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat adalah pulau beras basah. Tidak hanya menikmati keindahan pantai beras basah, pengunjung juga dapat menikmati keindahan alam bawa laut yang ada di wilayah tersebut. Sedangkan objek wisata budaya Kota Taman yang terletak di Bontang Kuala, para pengunjung dapat menikmati pesta laut yang diselenggarakan tiap tahunnya. Adapun kendala bagi para mengunjungi adalah aksesibilitas yang cukup sulit untuk menuju lokasi wisata di pulau beras basah serta insfratuktur yang masih minim.

Peluang investasi sektor industri masih menjadi unggulan di kota Bontang. Produk gas, pupuk dan turunannya masih menjadi daya tarik investasi. Hal tersebut didukung ketersediaan lahan dimana Bontang telah ditetapkan menjadi cluster industry di Kalimantan Timur. Kawasan industry Kaltim Industrial Estate menghadirkan pabrik baru dengan produk turunan gas, dan pupuk dengan mengembangkan menjadi produk amoniak, ammonium nitrate, melamine, dan lainnya. Beberapa perusahaan-perusahaan besar yang ada di Bontang, antara lain: PT. Pupuk Kaltim, PT. Badak NGL, PT. Kaltim Methanol Industri, PT Kaltim Pasifik Amoniak (KPA), PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI). PT. Pupuk Kaltim adalah produsen pupuk urea terbesar di Indonesia, disamping produsen amoniak

dan pupuk NPK. Pupuk Kaltim memenuhi kebutuhan pupuk domestik, baik untuk sektor tanaman pangan melalui distribusi pupuk bersubsidi, maupun non subsidi untuk sektor perkebunan dan industri. Dalam aktivitasnya, Pupuk Kaltim sangat menekankan pentingnya menjalankan sebuah industri yang ramah lingkungan dan dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat disekitarnya. Pupuk Kaltim merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero). PT. Badak NGL memiliki 8 (delapan) kilang LNG yang mendukung bisnis indonesia. Produksi LNG sejak tahun 1977 sebesar 3,3 juta ton menjadi lebih dari 22 juta ton LNG/tahun dan 1,2 jutaton LPG/tahun saat ini. Pasar terbesar PT Badak NGL adalah negara Jepang, antara lain pada perusahaan: Chubu Electric Power Co, The Kansai Electric Power Co, Kyushu Electric Power Co, Nippon Steel Corp, Osaka Gas Co. Ltd. Selain Jepang Negara tujuan lainnya adalah Rusia, Taiwan, Korea Selatan, USA, India, China dan lain-lain. PT. Kaltim Methanol Industri adalah pabrik yang memproduksi methanol, terletak di kawasan industri PT. Kaltim Industrial Estate (salah satu anak perusahaan PT. Pupuk Kalimantan Timur) kota Bontang, sekitar 110 kilometer sebelah utara kota Samarinda, Ibukota Propinsi Kalimantan Timur. PT. Kaltim Methanol Industri (KMI) didirikan berdasarkan Peraturan Perundangan RI pada tanggal 25 Januari 1991 sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pada tanggal 9 Desember 1997 status ini berubah menjadi perusahaan penanaman modal asing (PMA) dengan Nissho Iwai Corporation sebagai pemegang saham mayoritas sebesar (85%), PT. Humpuss 10 persen dan Daicel Chemical Singapore Pte Ltd 5 persen. Dengan mergernya Nisso Iwai Corporation dengan Nichimen Corporation menjadi Sojitz

Corporation pada tanggal 1 April 2004, maka kepemilikan saham dari Nisso Iwai Corporation berpindah kepada Sojitz Corporation. PT. KPI – Perusahaan Petrochemical yang memproduksi Ammoniak, terletak di Tanjung Harapan, Bontang Kalimantan Timur dengan luas daerah 6 hektar yang merupakan reklamasi pantai. Diantara sekeliling Plant terdapat juga beberapa Petrochemical Plant antara lain PT. Pupuk Kalimantan Timur (PKT), PT. Kaltim Pasifik Ammonia (KPA), PT. DSM Kaltim Melamine (DSM) dan PT. Kaltim Methanol Industri (KMI). Sisi selatan dari area plant merupakan pantai di mana terletak ammonia tank untuk penyimpanan produk dan jetty PT. KPI yang berfungsi untuk pengapalan produk. Ammonia merupakan raw produk, sehingga perlu dilakukan semacam perpaduan dengan unsur kimia lain agar produk tersebut dapat bermanfaat. Sehingga ammonia mempunyai produk turunan yang banyak, antara lain pupuk urea, ammonium nitrat. PT. Kaltim Pasifik Amoniak (KPA), berlokasi Bontang Kalimantan Timur berdiri pada 28 Juli 1997 dengan penanaman modal asing oleh Mitsui Co. Ltd and Toyota Tsusho (formerly Tomen Corporation), Jepang. KPA is an ammonia manufacturer and distributor with name plate capacity 2,000 MT (Metric Ton) per day which is equal to 660,000 MT per year. As a petrochemical industry, KPA always puts forward the aspects of quality, safety, health, environment care and compliance with laws as the first and main priority in its business operation. PT. Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) adalah produsen Amonium Nitrat (AN) berbentuk butiran berpori (prilled) terbesar di Indonesia dengan kapasitas 300.000 ton per tahun. Perusahaan ini merupakan kerjasama antara Orica Investment (Indonesia) Pty Ltd dengan mitra lokal – PT

Armindo Mitra Prakarsa, anak perusahaan Armindo Group yang merupakan pemegang saham terbesar. Pabrik AN yang berteknologi tinggi ini terletak di lokasi strategis di Bontang, Kalimantan Timur.

Potensi pariwisata di Kota Bontang masih dapat dikembangkan lebih baik dengan adanya sarana pendukung dan budaya khasnya, diantaranya :Wisata Budaya di Perkampungan Budaya Guntung yang rutin menggelar Erau Pelas Benua, Pesta Laut di Bontang Kuala, Danau Kanaan dan Makam Toraja., Wisata Bahari. Keindahan laut di Pulau Gusung, Karang Tepi, Wisata Mangrove dan Padang Lamun. Pantai Pulau Berasbasah, Resto Kafe Singapore dengan pemandangan replika patung merlion, Wisata Pendidikan. Dengan adanya Plant Tour ke Pabrik milik PT. Pupuk Kaltim dan PT. Badak NGL, Belajar Botani di Hutan Kota Wanatirta, Taman PKK Kota Bontang, Wisata Kuliner. Menikmati ikan bakar dan udang galah dari perkampungan di tengah laut, Selangan, Tihi-tihi, Melahing dan Pulau Gusung. Melepas kepenatan dengan berenang di Kenari waterpark, outbond Lembah Hijau di Bontang Lestari, atau sekedar bersantai di Taman Cibodas.

Data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Berau mencatat bahwa berdasarkan status kepemilikan modal kerja, hingga Juni 2015 di Kabupaten Berau terdapat 319 perusahaan, terdiri dari 238 buah perusahaan nasional, 57 buah PMDN, 17 buah PMA, dan 7 buah Joint Venture. Jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 33.476 orang. Dari 9 sektor lapangan pekerjaan, tenaga kerja terbanyak ada di sektor Pertambangan dan Penggalian.

Tabel 4.7. Jumlah Perusahaan dan Tenaga kerja di Kabupaten Berau Per Juni 2015

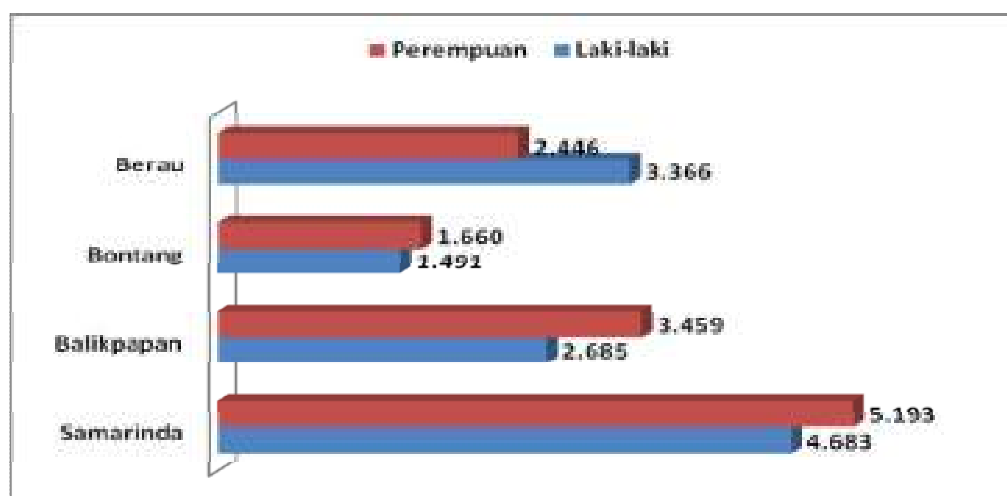
Sektor	Status Perusahaan				Tenaga Kerja			
	Nasional	PMDN	PMA	Joint Venture	Jumlah	WNI	WNA	Jumlah
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Perburuan	42	7	5	0	54	11.094	14	11.108
Pertambangan dan Penggalian	43	1	4	1	49	11.544	3	11.547
Industri Pengolahan	2	0	0	2	4	1.249	1	1.250
Listrik, Gas dan Air	3	2	0	1	6	300	0	300
Konstruksi Bangunan	22	3	0	0	25	1.113	0	1.113
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	76	4	1	1	82	2.892	0	2.892
Transportasi, Pergudangan dan Akomodasi	16	3	1	2	22	964	0	964
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	9	16	1	0	26	849	0	849
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perdagangan	25	21	5	0	51	3.451	2	3.453
Jumlah	238	57	17	7	319	33.456	20	33.476

Sumber: Dinas Tenaga kerja Kabupaten Berau, 2015

4.1.3. Sumberdaya Aparatur

Sumberdaya aparatur berkaitan erat dengan kualitas pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat. Seorang aparatur dapat dianggap profesional ketika memberikan pelayanan sesuai dengan harapan. Untuk menjadi profesional tentu saja diperoleh dari tingkat pendidikan, keterampilan dan pengalaman yang cukup. Di sini aparatur negara memiliki peran strategis dalam menjalankan amanah negara memberi pelayanan kepada masyarakat Indonesia maupun mereka yang tergabung di dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Penelusuran terhadap profil pegawai yang ada di lokasi studi dapat dilihat pada tabel berikut:

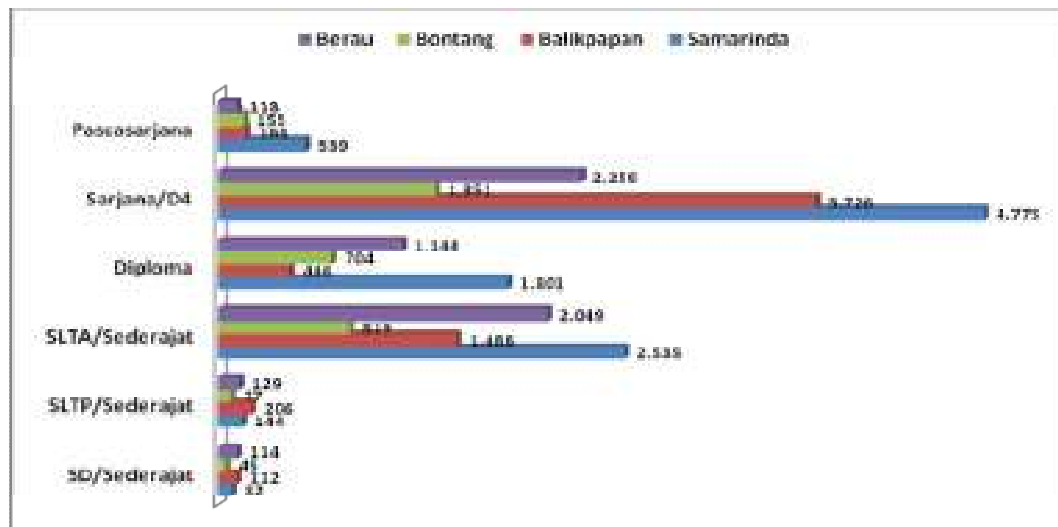
Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin yang ada di lokasi studi nampak bahwa di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan proporsi pegawai laki-laki sebesar 47,42 persen, pegawai perempuan sebesar 52,58 persen. Di Kota Balikpapan proporsi pegawai laki-laki sebesar 43,70 persen dan pegawai perempuan sebesar 56,30 persen. Di Kota Bontang proporsi pegawai laki-laki sebesar 47,32 persen dan pegawai perempuan sebesar 52,68 persen. Selanjutnya di Kabupaten Berau proporsi pegawai laki-laki sebesar 57,91 persen dan pegawai perempuan sebesar 42,09 persen. Perbedaan jenis kelamin akan berpengaruh pada perilaku dan pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pegawai laki-laki cenderung mengandalkan logika dalam membuat sebuah pertimbangan sehingga kerap kali terjadi hubungan yang kurang harmonis dengan masyarakat yang dilayani. Sebaliknya pegawai perempuan cenderung lebih berhati-hati dan mengandalkan perasaan dalam memberi pelayanan, sehingga masyarakat kerap merasa terlayani dengan baik. Meskipun dalam kasus tertentu ada pegawai perempuan yang tidak mampu memberi sebagaimana yang diharapkan masyarakat.



Gambar 4.6. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin di Wilayah Studi

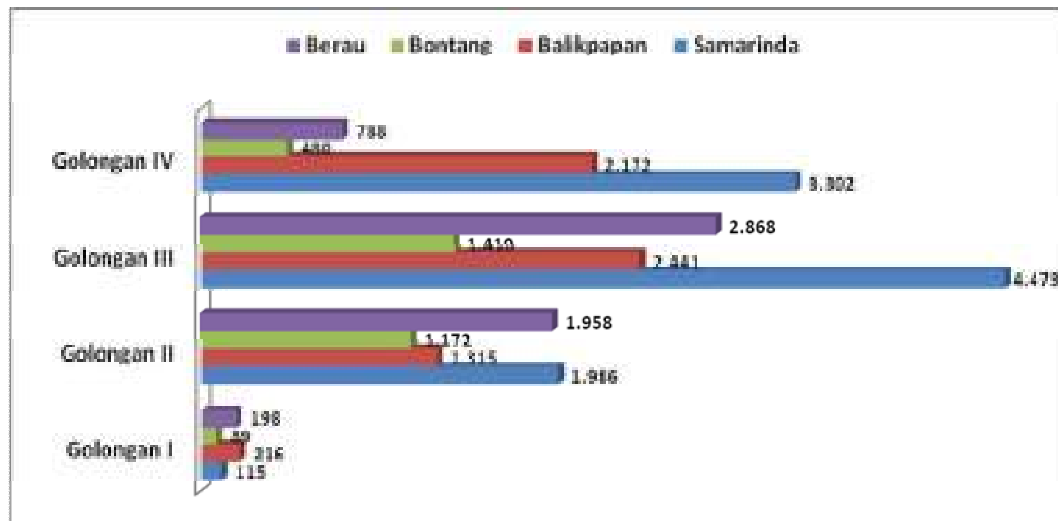
Menurut Notoatmojo (2003), pendidikan yang dilalui oleh pegawai sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadiannya. Dengan bekal pendidikan yang dimiliki oleh pegawai akan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi yang berkaitan dengan profesinya. Pegawai yang memiliki pendidikan yang baik dapat dijadikan sebagai pengembangan dimasa akan datang karena tanpa pendidikan sulit bagi seseorang untuk berkembang dan secara tidak langsung akan mempersulit berkembangnya organisasi. Tingkat pendidikan yang tinggi dari seorang pegawai akan mempengaruhi kemampuannya dalam mencapai kinerja secara optimal.

Dari jumlah pegawai nampak bahwa Kota Samarinda memiliki pegawai terbanyak (9.876 orang). Selanjutnya dilihat dari tingkat pendidikan kebanyakan pegawai di Daerah berpendidikan Sarjana/D4. Hal ini menunjukkan bahwa syarat kompetensi tingkat pendidikan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) telah terpenuhi. Pegawai yang berpendidikan Sarjana/D4 merupakan pelaksana pekerjaan yang diharapkan mampu melakukan analisa data sehingga dalam pengambilan keputusan pun dapat diterima secara logis. Sementara pegawai dengan tingkat pendidikan D3, SLTA/Sederajat maupun pada tingkat pendidikan di bawahnya lebih banyak difungsikan untuk jenis pekerjaan penunjang (operator).



Gambar 4.7. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan di Wilayah Studi

Komposisi pegawai berdasarkan golongan ruang adalah pada tingkat golongan III. Di sini pegawai golongan III memiliki fungsi yang sangat strategis. Pegawai pada golongan III diharapkan akan memiliki kemampuan dalam menganalisa masalah dan membuat rujukan yang akan digunakan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Karena itu, pelayanan yang diberikan pegawai golongan III terhadap masyarakat merupakan indikator dari kinerja aparatur negara. Proses pemberdayaan pegawai akan sangat efektif bila dilakukan pada mereka yang berada pada golongan III.



Gambar 4.8. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang di Wilayah Studi

4.1.4. Perizinan

Dalam rangka penertiban dan mendukung pemasukan bagi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah mewajibkan setiap pelaku usaha untuk melakukan pengurusan Izin. Dalam hal pemberian Izin Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) akan menyerahkan sebagian kewenangan operasional kepada pejabat di daerahnya, dengan maksud untuk mempermudah dan mempercepat berlangsungnya pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda No. 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi dan Hubungan Kerja telah menerbitkan 105 jenis pelayanan perIzinan (lihat lampiran). Pemerintah Kabupaten Berau melalui Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Badan Pelayanan PerIzinan Terpadu dan Penanaman Modal (terlampir).

Rata-rata lama pengurusan perizinan di Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- 1) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) selama 3 hari
- 2) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) selama 3 hari
- 3) IUI (Izin Usaha Industri) selama 5 hari
- 4) TDI (Tanda Daftar Industri) selama 5 hari
- 5) IMB (Izin Mendirikan Bangunan) selama 7 hari
- 6) HO (Izin Gangguan) selama 7 hari

Pemerintah Kota Bontang dalam rangka menertibak investasi telah menerbitkan 21 jenis perIzinan, meliputi:

- 1) Izin Pameran Dagang dan Hiburan Insidentil
- 2) Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet
- 3) Izin Trayek
- 4) Izin Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum
- 5) Izin Angkutan Barang dengan kendaraan Umum
- 6) Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA)
- 7) Izin Pengeboran Air Tanah (SIP)
- 8) Izin Pengambilan Bahan Mineral bukan Logam dan Batuan (Galian C)
- 9) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
- 10) Izin Lokasi
- 11) Izin Reklame
- 12) Izin Utilitas
- 13) Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan (SITU/HO)

- 14) Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol
- 15) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Kapasitas 2000 m³/Tahun
- 16) Izin Pembuangan Limbah Cair
- 17) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 18) Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 19) Tanda daftar Perusahaan (TDP)
- 20) Izin Usaha Pariwisata
- 21) Hiburan dan Rekreasi Umum.

Kabupaten Berau telah membentuk Badan Pelayanan PerIzinan Terpadu dan Penanaman Modal (berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas dan Badan). Pada tahap pertama Badan Pelayanan PerIzinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Berau telah melayani 12 jenis Izin dari 98 jenis Izin yang ada di Kabupaten Berau. PerIzinan yang dimaksud meliputi:

- 1) Izin Pemasangan Reklame, Spanduk dan Baleho;
- 2) Izin Mendirikan Bangunan;
- 3) Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- 4) Izin Usaha Rumah Makan/Retoran;
- 5) Izin Usaha Pariwisata;
- 6) Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 7) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 8) Izin Jagal;

- 9) Izin Petik Sarang Burung Walet;
- 10) Izin Angkut Sarang Burung;
- 11) Izin Lokasi;
- 12) Surat Persetujuan PMDN ke PMA.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Kemampuan Aparatur Pemerintah Dalam Memberikan Pelayanan Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Tuntutan AFTA 2015

Secara nasional, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengaturan MEA, yang meliputi:

- 1) Inpres No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi;
- 2) Inpres No. 1 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA;
- 3) Program Pembangunan MPEI;
- 4) Keppres No. 23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Sekretaris Nasional ASEAN;
- 5) Program Sistem Logistik Nasional (Sislognas);
- 6) Inpres No. 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam rangka menghadapi MEA;
- 7) Pembentukan Komite Nasional MEA 2015.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber dan dukungan data sekunder yang diperoleh, dapat diketahui bahwa aparat pemerintah di daerah belum sepenuhnya memahami AFTA maupun Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Meskipun AFTA telah ditanda tangani pada 1992, namun persiapan AFTA masih jauh dari harapan. Hingga pertengahan 2015 aparatur pemerintah di daerah masih menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang, di antaranya adalah melaksanakan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan yang diberikan masih berorientasi pada upaya menata pemerintahan yang baik.

Pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di empat lokasi penelitian, strategi pembangunan diarahkan pada pencapaian target peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia, peningkatan Sarana Prasarana dan Partisipasi Masyarakat. Artinya di sini aparatur di daerah melakukan perbaikan di tataran birokrasi dan mendorong peningkatan partisipasi pada tataran masyarakat.

Masuknya MEA ke daerah akan mengubah sistem maupun struktur ekonomi makro, karena itu aparatur di daerah seharusnya sudah dapat memahami upaya-upaya mengantisipasi perubahan tersebut. Pada tataran birokrasi perlu dilakukan penyederhanaan prosedur, cepat dan tepat, dengan harapan para investor lebih banyak lagi menanamkan modalnya di daerah.

Dari Visi dan Misi berikut strategi pencapaiannya, dapat dikatakan bahwa setiap Pemerintah Daerah telah berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang diwujudkan dalam bentuk mengikutsertakan aparatur negara dalam Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), baik yang bersifat penjenjangan maupun teknis (khusus).

Hubungan antara pendidikan dan pelatihan dengan kinerja pegawai saling mempengaruhi, dimana diasumsikan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan respon terhadap suatu kebutuhan organisasi. Hal ini sejalan dengan pemikiran dari Sudiro (2009) dalam Pakpahan *et al* (2015), menyatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia organisasi ialah melalui program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan terencana dan sistematis. Namun kenyataan yang ditemukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber, ketika seseorang pegawai telah selesai mengikuti Diklat dan kembali bertugas sebagai aparatur negara kerap kali tidak ditempatkan pada posisi yang menjadi bidang keahliannya. Sehingga mengikutsertakan pegawai dalam berbagai program Diklat tidak diimbangi dengan pemanfaatannya ketika ia kembali bertugas di instansinya. Cara dan perilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak banyak berubah (relatif sama dengan tidak belum mengikuti Diklat). Demikian pula, bagi pegawai yang belum berkesempatan mengikuti program Diklat, hanya sebagian kecil yang memiliki perhatian terhadap tugas-tugasnya dan bersedia memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Negara-negara yang tergabung di dalam MEA memiliki kepentingan yang sama dalam memajukan perekonomian, karena itu setiap negara akan berupaya mendapatkan peluang yang seluas-luasnya dalam melakukan ekspansi perdagangan di negara tujuan investasi. Peluang yang ada akan dikuasai oleh mereka yang memiliki kemampuan permodalan kuat disertai kualitas Sumberdaya manusia yang baik. Sementara di negara tujuan investasi harus mampu memberikan jaminan dan kemudahan dalam berusaha. Hal seperti ini tentu

menjadi tantangan bagi aparaturnegara untuk mengatur arus datang dan keluar dengan berpijakan pada aturan dan standarisasi yang berlaku. Beberapa jenis perizinan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah di Daerah belum berorientasi pada pelayanan arus masuk maupun arus keluar (mobilisasi), namun masih pada pelayanan dalam negeri yang berorientasi pada upaya penertiban usaha dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Persoalannya adalah apakah perizinan yang ada juga berlaku bagi MEA yang memiliki perbedaan hukum dan standar dari negara asal. Standar tinggi dan harga bersaing merupakan ancaman yang cukup serius bagi keberlangsungan dunia usaha dalam negeri (lokal).

Aparatur negara selaku pihak pemerintah seyoganya mendorong para pelaku usaha untuk bersikap kreatif dan membangun daya inovatif dalam menghadapi pasar global. Sebagai parameter dari kemampuan aparaturnegara dalam memberikan pelayanan adalah banyaknya investasi yang terlayani sehingga mendorong terjadinya peningkatan pendapatan nasional dan daerah.

Capaian pemerintah daerah Kota Samarinda sampai dengan akhir tahun 2014 yakni upaya pengembangan sektor ekonomi mendominasi Industri Kecil Menengah (IKM) dalam bentuk pengolahan barang jadi. Sementara untuk Industri Kecil berupa industri logam/logam mulia. Khusus Industri logam cukup berkembang pesat di Samarinda yakni bengkel (reparasi kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua), kemudian disusul industri kayu dan penerbitan/percetakan/reproduksi media rekaman. Industri penerbitan (percetakan dan foto copy) turut menjadi dominan. Pengembangan usaha perkoperasian cukup menggembirakan, yakni bertambahnya jumlah badan hukum koperasi,

diiringi dengan penambahan omzet dan jumlah anggota yang berdampak pada peningkatan omzet penjualan; daya beli anggota dan keuntungan koperasi itu sendiri selain itu Koperasi menjadi salah satu sarana penyedia lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dalam hal mengantisipasi MEA 2015 Walikota Samarinda mengeluarkan Surat Nomor 500/0303/Eko/V/2015 tertanggal 21 Mei 2015, memerintahkan Kepala Badan, Dinas dan Kantor terkait untuk menyusun Rencana Strategi untuk menghadapi MEA/AEC. Di sini Walikota Samarinda dengan mempertimbangkan pentingnya stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat, dukungan terhadap masuknya investor asing yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi, terbukanya peluang kerja, kesiapan UMKM, peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pelatihan-pelatihan KUKM dalam mengembangkan produk unggulan daerah, jaminan dan perlindungan hukum bagi pengusaha lokal dan serta dukungan terhadap pelaku usaha lokal.

Secara garis besar Rencana Strategi Pemerintah Kota Samarinda dalam menghadapi MEA, antara lain:

- 1) Pengawasan daya saing ekonomi;
- 2) Program Aku Cinta Indonesia (ACI);
- 3) Penguatan Sektor UMKM;
- 4) Perbaikan Infra Struktur;
- 5) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia; serta
- 6) Reformasi kelembagaan dan pemerintahan.

Di bagian lain yaitu dalam pelayanan perizinan, Pemerintah Kota Samarinda telah mencanangkan dan menyederhanakan proses perijinan dan percepatan untuk peningkatan investasi di Kota Samarinda, hal ini proses pengurusan sampai selesai antara 3-7 hari. Penyederhanaan proses pelayanan dokumen oleh aparatur pemerintah Kota Samarinda disambut baik oleh pelaku usaha, ini terbukti menjamurnya usaha kecil yang sedang tumbuh hampir merata sampai keseluruhan wilayah ini. Dengan pertumbuhan usaha kecil ini, maka pertumbuhan ekonomi kerakyatan bertambah, mampu menopang ekonomi kecil, kesempatan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat sektor non formal.

Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun Rencana Aksi Nasional dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015. Penyusunan rencana strategis MEA yang dibuat oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Tahun 2016 – 2020 Kota Balikpapan dimaksudkan sebagai upaya memfokuskan seluruh dimensi kebijakan pada semua bidang kewenangan Dinas/Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Fokus Program Ekonomi guna meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Nasional dan untuk berbagai komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN. Di dalam dokumen disebutkan langkah-langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menghadapi MEA 2015, yaitu:

- 1) Pemberdayaan UMKM / IKM / Koperasi dengan dukungan pendanaan/fasilitasi pelatihan serta pembinaan oleh Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas teknis

- 2) Peningkatan kemudahan UMKM / IKM / Koperasi terhadap akses ke informasi mengenai pasar, promosi, pameran dan teknologi, permodalan perbankan, dan lain-lain.
- 3) Perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha dan masyarakat.
- 4) Pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pemberian ijin minuman beralkohol, informasi harga dan ketersediaan pangan strategis.
- 5) Pendampingan dan fasilitasi permodalan bagi IKM / UMKM
- 6) Membantu pemasaran produk IKM dengan stakeholder dengan bekerjasama PT. Angkasa Pura, Perhotelan, Mall, Supermarket, minimarket.
- 7) Mengembangkan sentra industri kecil sumber (SIKS) dan persiapan sentra industri kecil, pembentukan perusahaan kawasanperuntukan industri di kariangau pengolahan hasil pertanian dan perikanan di KelurahanTeritip.
- 8) Pengembangan dan pengoptimalan 9 IIB di kecamatan dan SIKS
- 9) Peningkatan kualitas SDM aparat, Pengurus Koperasi dan UMKM / IKM
- 10) Peningkatan desain dan diversifikasi produk serta Fasilitasi Perkuatan Hukum melalui pelatihan kemasan, kualitas produk dan Kepemilikan Sertifikat Merk, Hak Cipta,kesehatan / higienis produk serta Halal
- 11) Peningkatan produk unggulan baik kualitas dan kuantitas
- 12) Optimalisasi tera dan tera ulang.

Di Kota Bontang, berhubung hampir 80 persen wilayahnya merupakan perairan, dalam menyambut MEA Pemerintah Kota Bontang memberikan perhatian khusus pada sektor perikanan. Pemerintah Kota Bontang melalui

BP2TSP membuka secara luas bagi para penanam modal untuk pengembangan dan produksi diberbagai bidang seperti : penangkapan ikan, pengolahan ikan asin dan sarana penunjang lainnya. Melakukan budidaya udang, budidaya ikan sesuai habitatnya. Pemerintah Kota Bontang meningkatkan pemberian dana insentif bagi daerah terpencil guna menggairahkan peningkatan produksi hasil perikanan sehingga mampu meningkatkan daya saing kepada pihak luar.

Sementara itu di Kabupaten Berau, pemerintah daerah belum menyusun perencanaan ataupun kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada masuknya MEA ke Indonesia. Pemerintah Daerah melakukan penguatan institusi dengan menyertakan pegawai ke dalam program Diklat yang bersifat reguler. Setiap pegawai disertakan di dalam program Diklat menurun jenjang kepangkatan. Meskipun ada juga beberapa orang pegawai yang mendapat tugas belajar, namun hanya difokuskan untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah. Dari aspek pembiayaan terjadi peningkatan biaya pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan Diklat atau studi lanjut. Dari aspek pelayanan, Pemerintah Kabupaten Berau masih pada tataran menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan. SOP yang saat ini dipersiapkan Pemerintah kabupaten Berau meliputi: SOP Penerbitan Izin Usaha Industri, SOP Perbitan Persetujuan Prinsip, SOP Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), SOP Penerbitan Tanda Daftar Industri, SOP Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan, SOP Penerbitan Izin Tanda Daftar Usaha Kepariwisataaan. Di sini menunjukkan adanya keterlambatan Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan proses perizinan dalam pelaksanaan layanan administrasi. Karena itu, pemerintah daerah sudah harus

mempersiapkan sumberdaya manusia yang handal (terlatih) dalam menghadapi perubahan pola layanan bagi investor yang akan masuk ke daerah.

4.2.2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam Memasuki AFTA 2015

Memasuki AFTA 2015 bukanlah hal yang istimewa ketika kualitas sumberdaya manusia aparatur di daerah telah memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.

Bila dilihat dari profil pegawai di empat lokasi studi nampak bahwa kebanyakan pegawai berpendidikan Sarjana dan berada pada golongan III. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur negara yang ada di daerah berada pada level manajemen yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Hal-hal yang mendorong pegawai untuk siap menghadapi MEA 2015, antara lain:

- 1) Setiap pegawai wajib meningkatkan kinerja. Karena kinerja merupakan parameter seseorang aparatur negara mampu atau tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanahkan undang-undang dan harapan seluruh masyarakat Indonesia;
- 2) Setiap pegawai dituntut untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan tuntutan kebutuhan layanan bagi masyarakat;
- 3) Setiap pegawai menyadari akan menghadapi persaingan sumberdaya manusia, karena itu produk yang dihasilkan harus memiliki daya saing yang dapat diterima masyarakat maupun anggota MEA.

- 4) Adanya kesempatan yang luas dan penghargaan pemerintah bagi pegawai yang memiliki kinerja baik dan kemampuan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
- 5) Rasa nasionalisme yang kuat akan mendorong pegawai untuk mengajak masyarakat mencintai produk dalam negeri, meskipun tetap menerima kehadiran MEA di daerah.

Ketidakmampuan pegawai daerah sebagai aparatur negara menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti Diklat, antara lain disebabkan:

- 1) Adanya stagnan antara teori yang didapat dengan realita yang dihadapi di lingkungan kerja;
- 2) Kurang perhatian pimpinan terhadap pencapaian hasil belajar yang diraih seorang pegawai;
- 3) Kesempatan promosi yang hilang, walaupun ada biasanya kurang sesuai dengan harapan.
- 4) Kondisi lingkungan kerja yang cenderung bertahan pada budaya kerja status quo.
- 5) Pemahaman terhadap manajemen mutu yang masih relatif kurang.

Kondisi sebagaimana di atas akan mempengaruhi cara seorang aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan masih lemahnya kesiapan aparatur pemerintah di daerah menghadapi MEA yang masuk ke Indonesia (hingga ke daerah-daerah).

Beberapa kendala yang dihadapi aparatur negara dalam menghadapi MEA, antara lain:

- 1) Keterbatasan anggaran untuk pengembangan sumberdaya manusia yang berorientasi pada MEA. Sebagai contoh pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Berau menyediakan anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai sebesar Rp. 6.699.500.000,-. Anggaran tersebut akan digunakan untuk Diklat Penjenjangan dan Studi lanjut bagi pegawai baru (CPNS) hingga eselon II.
- 2) Belum adanya penganggaran khusus bagi peningkatan kapasitas pegawai untuk menghadapi perubahan dengan masuknya MEA hingga ke daerah.
- 3) Rasio antara pegawai yang memiliki kualifikasi terknis dengan unit usaha yang dibina sangat besar, sehingga tidak mampu bekerja secara optimal. Di Samarinda hanya terdapat 1 orang pegawai yang memiliki kualifikasi Petugas Pegawai Barang dan Jasa (PPBJ) yang berkedudukan di Dinas Perdagangan dan Koperasi. Petugas ini memiliki tugas mengawasi peredaran barang dan jasa yang ada di pasar. Karena unit usaha perdagangan dan jasa yang sangat banyak, maka pekerjaan yang dilakukan masih jauh dari harapan.
- 4) Penempatan petugas yang tidak sesuai kompetensi. Ada kecenderungan pegawai-pegawai yang telah mendapatkan pelatihan khusus (keteknisan), setelah selesai mengikuti program pelatihan dipindahtugaskan ke bagian yang tidak memiliki hubungan dengan keahlian yang dimiliki.

Kondisi aktual di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ashari (2010), yang menyatakan bahwa ketidakberdayaan PNS (aparatur) merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk menghadapi tantangan

perubahan masyarakat nasional maupun global. Di sini konsepsi operasional pemberdayaan Pegawai negeri Sipil selaku Aparatur Negara dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur manajemen sumberdaya manusia, melalui langkah-langkah kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat potensi baik aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap unjuk kerja, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, memberi akses dan fasilitas agar pegawai memperoleh kebebasan dan kemandirian berinisiatif, berinovasi, serta berkreasi mengoptimalkan kinerjanya.

Masih menurut Ashari (2010) alasan utama yang melatar belakangi dilaksanakan kebijakan pemberdayaan pegawai selaku aparatur negara, di samping sebagai upaya untuk meningkatkan daya guna, hasil guna dan memiliki nilai tambah dalam organisasi adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi dan menindaklanjuti penyelesaian persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas serta kinerja pegawai yang belum optimal; serta praktek kolusi dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi yang masih kerap terjadi. Di setiap langkah kegiatan pemberdayaan pegawai yang lebih penting adalah peran dan fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah harus tepat, sebagai perumus kebijakan dan sekaligus sebagai fasilitator dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, persoalan utama diperlukannya pemberdayaan aparatur negara adalah menumbuhkan tanggungjawab moral dan memotivasi pegawai agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dalam pelaksanaan AFTA setiap pegawai harus mampu memberikan layanan yang

dibutuhkan MEA secara efektif dan efisien dengan tetap menjaga kedaulatan negara, artinya bahwa kita membutuhkan investor untuk bersedia menanamkan modalnya di Indonesia, namun harus ada upaya pengawasan yang terintegrasi antar pemangku kepentingan agar tidak merusak sumberdaya alam dan lingkungan yang merugikan dan menghambat keberlanjutan pembangunan di masa mendatang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Aparatur pemerintah di daerah telah dipersiapkan untuk memberikan layanan terhadap publik melalui Program Pelatihan dan Pendidikan (Diklat), Fungsional, Bimbingan Teknis, hingga Studi Lanjut. Namun tidak dipersiapkan untuk memberikan layanan yang bersifat global atau lintas antara bangsa.
- 2) Sumberdaya Manusia yang dimiliki pemerintah daerah telah mencukupi untuk memberikan layanan publik, namun karena penempatan yang kurang tepat dan tidak proporsional (sesuai kebutuhan) kerap kali dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi kurang efektif.
- 3) Masuknya MEA merupakan peluang sekaligus ancaman bagi kelangsungan usaha di daerah. Peluang dalam memperluas lapangan usaha, kesempatan kerja bagi masyarakat, dan sumber pendapatan daerah. Namun juga merupakan ancaman bagi investor lokal yang kurang kompeten ataupun kurang memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam kerjasama AFTA.
- 4) Kebanyakan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah telah bekerja menurut aturan yang berlaku, namun belum sesuai dengan standar-

standar yang berlaku, sehingga timbul stagnan antara data aktual dengan keputusan yang diambil.

- 5) Masih dibutuhkan aparatur pemerintah yang bersertifikat pengawas perdagangan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup besar untuk melakukan pengawasan peredaran barang dan jasa sebagai dampak dari masuknya MEA.

5.2. Saran-saran

Saran yang diharapkan dapat diimplementasikan dari hasil penelitian ini adalah:

- 1) Penganggaran yang cukup dalam mendukung Sumberdaya Manusia yang handal bagi aparatur negara yang akan mengikuti program-program pelatihan yang berhubungan dengan layanan terhadap MEA. Hal ini akan menurunkan rasio antara tenaga teknis tersedia dengan jumlah layanan yang ditangani.
- 2) Diperlukan regulasi yang mampu memberi perlindungan bagi unit-unit usaha dalam negeri (terutama dengan permodalan kecil) dan produk-produk dalam negeri yang beredar di pasar.
- 3) Pemerintah daerah harus mampu mengintegrasikan antara kebutuhan MEA dengan program pembangunan yang diprioritaskan. Cara demikian merupakan upaya melembagakan kesepakatan-kesepakatan AFTA di dalam program-program nasional dan daerah.

- 4) Mewajibkan semua pegawai di lingkungan pemerintah daerah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan standar-standar yang berlaku.
- 5) Setiap pimpinan di lingkungan pemerintah daerah seyogyanya mempersiapkan dan memotivasi pegawai-pegawai yang muda dan energik melalui program pelatihan teknis (sertifikasi), dan menempatkan mereka yang telah mendapatkan sertifikasi ahli di pos-pos jabatan sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Dengan cara demikian akan membuka kesempatan bagi mereka dalam mengimplementasikan ilmunya secara efektif.
- 6) Diperlukan sosialisasi intensif bagi masyarakat dan para pelaku usaha perihal aturan dan standarisasi barang dan jasa yang diberlakukan bagi anggota MEA.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, Edy Topo., 2010. *Strategi Pemberdayaan PNS Dalam Rangka Reformasi Birokrasi*. Jurnal Administrator Borneo Vol. 6 No. 1 Tahun 2010. PKP2A III LAN, Samarinda.
- Arikunto, Suharsimi. 2002) *Prosedur Penelitiann; Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. Rineka Cipta, Jakarta.
- Hendrayady, Agus. 2006. “*Hubungan antara Aspek-Aspek Pemberdayaan dengan Kualitas Pelayanan Pegawai : Studi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Janggi Tanjungpinang Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau*”. Tesis, Program Magister Ilmu Sosial Untan Pontianak.
- Hendayady, Agus., 2011. *Pendayagunaan Aparatur Daerah; Telaahan Teoritis terhadap Kinerja Paratur Daerah*. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011
- Hutauruk, Thomas Robert. 2010. *Tinjauan Daya Inovasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur*. Jurnal Administrator Borneo Volume 6 Nomor 3 Tahun 2010. PKP2A III LAN, Samarinda.
- Kotler, Philip. Alih Bahasa: Benyamin Molan. 2005. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Kesebelas. Jilid 1. Intan Sejati Klaten. Jakarta.
- Kotler, Philip. Alih Bahasa: Benyamin Molan. 2005. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Kesebelas. Jilid 2. Intan Sejati Klaten. Jakarta.
- Makmur. 2003. “*Pemberdayaan Aparatur Pemerintah dalam Masyarakat*”, dalam Jurnal Ilmiah *Good Governance* Vol. 2 No. 1, Maret Tahun 2003, Jakarta, STIA-LAN.
- Moekijat, 2000, *Manajemen Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja*. Pionir Jaya, Bandung.
- Naisbitt, John dan Patricia Aburdene., 1990. *Megatrends 2000*. Binarupa Aksara, Jakarta.
- Pakpahan, Edi Saputra; Siswidiyanto; Sukanto., 2015. *Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1, Hal. 116-121

- Pasaribu, Benny., 2010. *Regulasi dan Persaingan Sehat dalam Sistem Ekonomi Indonesia*. Jurnal Persaingan Usaha. KPPU RI. Edisi IV Desember 2010, Jakarta.
- Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025*.
- PermenPAN dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 tentang *Pedoman Standar Pelayanan*.
- Said, Ismail. 2003. “*Tantangan Sumber Daya Aparatur*”, dalam Jurnal Ilmiah *Good Governance* Vol. 2 No. 1, Maret Tahun 2003, Jakarta, STIA-LAN.
- Sedarmayanti. 2003. “*Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dalam rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*”, Mandar Maju, Bandung.
- Sugiarto, Endar., 2002. *Psikologi Pelayanan dalam Industri Jasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta..
- Notoatmojo. Soekidjo., 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta, Jakarta:
- Tjiptono, Fandy., 2001, *Strategy Pemasaran*, Andi offset, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Trilestari, Endang Wirjatmi., 2007. *Manajemen Pelayanan Umum*. Bahan Persentasi Seminar. STIA-LAN, Bandung.
- Undang-Undang No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.
- Winarty, Army. 2003. *Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur dalam Rangka Peningkatan Kinerja Organisasi Publik*, dalam Jurnal Ilmiah *Good Governance* Vol. 2 No. 1, Maret Tahun 2003, Jakarta, STIA-LAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA : Menetapkan Tim Seleksi dan Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian Terapan Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Seleksi Kegiatan Penelitian Terapan Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas yaitu memberikan penilaian terhadap proposal dan Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian Terapan Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas yaitu melaksanakan kegiatan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;

Adapun *output* dari kegiatan ini adalah laporan penelitian yang menggambarkan kondisi Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim dalam menghadapi AFTA 2015 ditinjau dari aspek pelayanan publik. Dari *output* di atas maka kajian ini diharapkan menghasilkan *outcome* yaitu memberikan bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan terkait pelaksanaan AFTA 2015;

Dalam melaksanakan tugasnya tim dan panitia tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Anggaran ditetapkan dengan ketentuan apabila
liruan dalam penetapannya akan diperbaiki

dikemudian hari terdapat keke
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 04 Mei 2015

Kepala,

Prof. Dr. H. Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd

Pembina Utama

NIP. 19600216 198511 1 001

i Samarinda
atan Timur di Samarinda
Kaltim di Samarinda;

Tembusan :

- Yth.
1. Gubernur Kalimantan Timur;
 2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 4. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur di
 5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan
 6. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov. K
 7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 070/ 45 /III/LITBANG, TENTANG PENETAPAN NAMA TIM SELEKSI DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN TERAPAN DOSEN PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN) / PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) TAHUN 2015

SUSUNAN TIM SELEKSI DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN TERAPAN DOSEN PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN) / PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) DENGAN JUDUL PERBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015

1. TIM SELEKSI

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Rustan. A, SP, MA, M.SE | PKP2A III LAN |
| 2. Prof. Dr. Hj. Nur Fitriah, M.Si | Universitas Mulawarman |
| 3. Ir. Noor Albarakati, MT | Balitbangda Prov. Kaltim |

2. TIM PELAKSANA

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Thomas Robert Hutauruk, S.P, M.Si | STIMI –Samarinda |
| 2. Salasiah, S.Sos, M.Si | Untag 1945 Samarinda |
| 3. Jamli, S.Sos, M.Si | Poltek Negeri Samarinda |

Samarinda, 04 Mei 2015



Prof. Dr. H. Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd
Kepala
Pembina Utama
NIP. 19600216 198511 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan M.T Haryono, Telp. (0541) 201446 Fax. (0541) 732286
web http : //litbang.kaltimprov.go.id
e-mail : humas.litbang@litbang.kaltimprov.go.id
SAMARINDA (75124)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 070 / 63.../III/Litbang

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SELEKSI DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN
TERAPAN DOSEN PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN) / PERGURUAN TINGGI
SWASTA (PTS) TAHUN 2015**

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menunjang dan mendapatkan hasil yang optimal kegiatan Penelitian Terapan Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) / Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Tahun 2015, maka dipandang perlu membentuk Tim Seleksi dan Tim Pelaksana kegiatan dimaksud dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya dapat diangkat sebagai tim dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2005 Tentang Jabatan Peneliti di lingkungan departemen;
8. Peraturan Gubernur Nomo 47 Tahun 2014 Pemberian Horor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
9. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Penerbitan dan Penandatanganan Produk hokum Daerah yang bersifat Penetapan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Memperhatikan** : 1. Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 – 2018;
2. DPA-SKPD Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2015.